







# ANALISA

MASALAH - MASALAH  
INTERNASIONAL

AFRIKA SELATAN SAHARA





## PENGANTAR PENERBIT

Banyak hal tentang Afrika yang akhir-akhir ini perlu mendapatkan perhatian. Sebagai satu bagian dari apa yang lazim disebut dunia ketiga, Afrika adalah satu benua yang sedang berada di dalam suasana kebangkitan, baik itu kebangkitan politik, kebangkitan ekonomi maupun sosial. Di dalam keadaan serupa itu maka gerakan-gerakan pembebasan merupakan gejala yang utama. Adalah di Afrika bahwa sejarah masih melihat sisa-sisa kolonialisme lampau. Adalah di Afrika bahwa dunia masih menghadapi kubu-kubu apartheid, diskriminasi dan rasialisme.

Dalam latar belakang proses kebangkitan tersebut dekolonisasi, baik yang terlaksana melewati jalan-jalan damai maupun yang terwujud dengan cara-cara kekerasan, merupakan kenyataan sejarah yang masih aktual. Itulah sebabnya maka langkah-langkah dekolonisasi yang akhir-akhir ini diambil oleh pemerintah Portugal merupakan peristiwa yang besar artinya dan cukup menarik perhatian, baik di kalangan dunia bangsa-bangsa pada umumnya maupun bagi dunia Afrika pada khususnya.

Dengan proses-proses liberalisasi tersebut Afrika telah melahirkan negara-negara baru yang merdeka dan berdaulat. Hasil-hasil yang dicapai oleh Afrika secara kuantitatif memang sangat spektakuler. Hal ini ternyata mempunyai implikasi internasional juga. Akibat yang paling jelas adalah terjadinya perubahan polaimbangan suara di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apabila beberapa tahun yang lalu di dalam majelis bangsa-bangsa tersebut Afrika masih hanya merupakan satu kekuatan yang kuantitatif kecil, dewasa ini ia telah menjadi satu kenyataan yang secara kuantitatif besar. Afrika sebagai satu kesatuan mempunyai 44 suara di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Akan tetapi lahirnya negara-negara baru yang merdeka dan berdaulat itu tidaklah tanpa persoalan bagi Afrika sendiri sebagai satu entitas besar. Hal ini menyangkut pola interaksi dan komunikasi antara negara-negara Afrika itu sendiri satu sama lain. Usaha-usaha yang menuju ke arah persatuan Afrika memang telah banyak dilaksanakan. Tetapi sementara itu gejolak-gejolak pertentangan satu dengan yang lain, perebutan kekuasaan, perebutan pengaruh dan kecurigaan, masih merupakan kenyataan yang belum teratasi.



Tidaklah mengherankan bahwa bagian dunia yang begitu besar seperti Afrika ini, dengan berbagai kerawanan di dalam serta dengan kemungkinan-kemungkinan perkembangan yang belum menentu, telah pula menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar di dunia ini. Sementara itu Afrika kiranya juga mempunyai potensi-potensi yang masih belum seluruhnya diketemukan dan diolah, di samping adanya wilayah-wilayah yang mempunyai letak-letak yang sangat strategis, dari mana jalur-jalur internasional dapat selalu diawasi dan dikuasai.

Itulah sebabnya maka dengan ANALISA MASALAH-MASALAH INTERNASIONAL Tahun III nomor 11, Nopember 1974 ini, Centre for Strategic and International Studies menyajikan beberapa karangan tentang Afrika. Pertama-tama disajikan satu tulisan yang bersifat umum oleh O. ABDUL RACHMAN. Selanjutnya dua karangan, masing-masing tentang Guinea Bissau dan Ethiopia, yang ditulis oleh Kirdi DIPOYUDO.

Semua itu dengan harapan agar kita dapat selalu mengikuti dan mengenal keadaan serta dengan perkembangan yang terjadi di bagian dunia tersebut.

Nopember 1974

C.S.I.S.

# DAFTAR ISI

	<u>Hal.</u>
<u>Pengantar Penerbit</u>	i
<u>Afrika Bergolak Terus</u>	
O. Abdul RACHMAN	3
<u>Guinea Bissau Merdeka</u>	
Kirdi DIPOYUDO	31
<u>Pergolakan di Ethiopia</u>	
Kirdi DIPOYUDO	59



Diterbitkan oleh

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Tanah Abang III/27, Jakarta





I. Perubahan Politik Portugal dan Implikasinya

Peristiwa pada bulan April 1974 di Portugal, yang merupakan suatu coup tak-berdarah, telah menggulingkan pemerintah konservatif di bawah Perdana Menteri Caetano dan digantikan oleh sebuah pemerintah baru dengan Jendral Spínola sebagai Presiden pertama. Pada waktu itu, Presiden Spínola memperkenalkan "Junta of National Salvation" yang terdiri dari Spínola sebagai ketua, Jendral Gomez, tiga Jendral Angkatan Darat dan dua Komodor dari Angkatan Laut sebagai anggota. Motivasi Junta antara lain adalah: "to restore fundamental rights; elections for a representative legislature will be held within one year; the African wars would be ended in such a way as to guarantee the survival of the nation as a sovereign country in its multi-continental entity".

Coup bulan April 1974 tersebut mengakhiri pemerintah kediktatoran rezim Salazar dan Caetano yang selama lima puluh tahun ini menguasai Portugal. Berlainan dengan rezim kediktatoran di Spanyol dan di Yunani yang dapat memperkembangkan kemakmuran rakyat, di Portugal Salazar dan Caetano, walaupun didukung oleh elite yang kaya, hanya berusaha menutup perbatasan-perbatasan Portugal terhadap perkembangan politik, ekonomi dan sosial yang telah membawa kemakmuran di negara-negara lain di Eropa Barat, terutama sejak Perang Dunia II. Sebagai anggota NATO, Portugal memang mendapat penghasilan karena Amerika Serikat menyewa beberapa pangkalan Angkatan Udara di kepulauan Azores; akan tetapi ekonomi dalam negeri tidak berkembang, yang mengakibatkan bahwa banyak warga Portugal mencari rezeki di negara-negara Eropa Barat sebagai "gast-arbeiter". Penghasilan pekerja-pekerja Portugal yang dikirimkan kembali ke keluarga-keluarganya, merupakan devisa yang melebihi pendapatan dari bidang tourisme. Lalu lintas pekerja-pekerja Portugal ke negara-negara Eropa Barat lainnya, ditambah lagi dengan pengalaman-pengalaman pasukan-pasukan Portugal yang dalam rangka NATO berdinam di Eropa Barat, menggairahkan kondisi mental sementara orang Portugal sehingga mereka dapat membandingkan keadaan terbelakang Portugal dengan kemajuan-kemajuan bangsa-bangsa lain di Eropa Barat.



Dengan pengawasan ketat oleh Dinas Rahasia yang terkenal dengan nama D.G.S., bertahun-tahun Portugal menutup pemberitaan tentang oposisi dalam negeri, baik di kalangan condekiawan, di kalangan mahasiswa-mahasiswa, maupun di kalangan rakyat banyak, baik pekerja maupun tani.

Akan tetapi pada tahun 1961 terjadilah tiga peristiwa yang merupakan permulaan dari keruntuhan kediktatoran Portugal. Pada tahun 1961, daerah Portugal di Goa diduduki oleh India, tanpa perlawanan dari tentara Portugal. Tentara ini kemudian dikembalikan. Dapat dimengerti bahwa pasukan-pasukan Portugal tadi membawa moral yang sangat rendah. Pada tahun 1961 itu juga terjadi pembajakan kapal penumpang serba lux, Santa Maria, oleh seorang kapten kapal, sebagai pertanda protes terhadap Salazar. Juga pada tahun 1961 melotus pemberontakan bersenjata di Angola, yang kemudian disusul dengan pemberontakan-pemberontakan di Guinea Bissau (1963) dan di Mozambik (1964). Kondisi mental rakyat Portugal sedianya dipupuk oleh pemerintahnya dengan anggapan bahwa orang-orang Afrika "senang" dengan pemerintah Portugal. Tidak mengherankan bahwa perang kolonial Portugal yang tidak dapat menumpas pemberontakan-pemberontakan orang Afrika akhirnya telah menimbulkan kekecewaan dan mengakibatkan Kondisi "battle fatigue" di antara orang Portugal.

Rumusan motivasi Junta yang diumumkan oleh Spínola, memang bersifat radikal bila dibanding dengan rezim Caetano. Akan tetapi dalam rumus-rumus tadi masih tercakup cita-cita Portugal agar hubungan antara daerah-daerah koloni dengan Portugal masih dapat dipelihara dalam bentuk "Lusitanian Community", dengan bekas daerah-daerah Portugal Seberang Lautan diberi otonomi luas dan "suara" di Lisbon untuk turut menentukan policy Community.

Perkembangan sejak bulan April menunjukkan bahwa policy Spínola dalam pelaksanaannya ketinggalan dengan kenyataan-kenyataan baik di Portugal, maupun di daerah-daerah Seberang Lautan. Penghidupan politik terbuka di Portugal telah memungkinkan Partai Komunis Portugal untuk memegang peranan, terutama di kota-kota. Lain daripada itu ternyata bahwa Junta yang terdiri dari Jendral-jendral dan Komodor-komodor Angkatan Laut itu kalah kuat dengan sekolompok opsir-opsir muda yang ber pangkat kapten dan mayor, yang pada akhir bulan Oktober 1974 berhasil menggantikan Spínola dengan Jendral Gomez, sedangkan Perdana Menteri Goncalves tetap berkuasa. Politik pemerintah Goncalves lebih mengarah ke kiri, mungkin untuk mendamaikan arus komunisme dalam menghadapi pemilihan umum pada tahun 1975 seperti dijanjikan.



Proses dekolonisasi rupanya akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu, artinya akhir tahun 1975 semua persoalan dekolonisasi sudah selesai. Hal ini antara lain akan menimbulkan persoalan tentang repatriasi ribuan orang Portugal putih dari Afrika ditambah lagi dengan ribuan tentara yang harus ditarik kembali. Akan timbul persoalan mengenai perkembangan ekonomi terutama di Angola dan Mozambik, yang tadinya membawa devisa untuk Portugal: apakah Angola merdeka dan Mozambik merdeka masih akan membawa manfaat untuk Portugal yang miskin?

Prospek dekolonisasi Portugal pasti akan membawa akibat dalamimbangan kekuatan di Afrika, sementara untuk Portugal sendiri prospek untuk waktu yang akan datang juga tidak kelihatan mantap.

## II. Sedikit gambaran tentang: Guinea Bissau, Mozambik, Angola

GUINEA BISSAU terletak di Afrika Barat. Negara kecil dengan penduduk berjumlah 550.000 pada sensus 1969. Penghasilan utama adalah dari pertanian. Perang kemerdekaan yang sangat gigih, memaksa Portugal untuk menempatkan 30.000 tentara. Di bidang ekonomi Guinea Bissau memperlihatkan neraca perdagangan yang negatif, dengan import sebanyak 580.000 contos<sup>1</sup> sedangkan export hanya 85.000 contos. Komodities yang diexport pada tahun 1968 adalah kacang tanah dan minyak kelapa sawit, masing-masing merupakan 60 dan 30% dari jumlah export seluruhnya. Terdapat juga bauksit dan minyak, akan tetapi karena kondisi perang ekonomi tidak dapat dikembangkan.

MOZAMBIK di Afrika Timur merupakan daerah Portugal di Afrika yang luasnya 784.961 km persegi dengan penduduk menurut sensus tahun 1968, sejumlah 6.603.633; yang terbagi dalam 97.245 kulit putih, 2.000 orang Cina, 17.000 orang keturunan India dan Pakistan, 31.000 orang Mestizo, 2.500 orang kulit putih dari Afrika Selatan dan Inggris dan 6.500.000 orang Afrika.

80% penduduk bekerja dalam sektor pertanian, 80% barang ekspor adalah hasil pertanian dan perkebunan. Iklim di Mozambik lebih baik daripada iklim di Angola. Di Mozambik terdapat pertanian modern yang dikerjakan di 3.000 perkebunan dan sawah-sawah pertanian yang meliputi 4 juta acres, dengan buruh Afrika sebanyak 130.000. Sebaliknya orang-orang Afrika mengerjakan 7 juta acres dengan jumlah pekerja yang jauh lebih besar.

---

<sup>1</sup> 1 contos = 1000 escudos  
100 escudos = US\$ 3.50.

Di sektor pertambangan, komoditi utama adalah batu bara yang hasilnya mencapai sebanyak 350.000 ton. Sebagian besar dipakai sendiri, sebagian kecil diekspor. Di samping itu terdapat biji besi di sekitar Lorenzo yang akan dikerjakan oleh Jepang dengan modal permulaan sebesar 50 juta. Diketahui pula bahwa terdapat sumber pertambangan lain yang sampai sekarang belum dikerjakan.

Neraca pembayaran Mozambik memperlihatkan gejala negatif yang makin lama makin besar, terutama setelah pasukan-pasukan pembebasan di bawah pimpinan Frelimo menjadi makin kuat, serta meningkatkan operasi-operasinya. Pemerintah Portugal dalam rangka pembangunan Mozambik sedang membuat Bendungan Raksasa di Cabora Dassa, yang dikerjakan dengan modal Afrika Selatan, Jerman dan Perancis. Sedianya direncanakan bahwa bendungan raksasa ini akan selesai dalam tahap pertama pada tahun 1974, akan tetapi dengan adanya gangguan-gangguan dari Frelimo, rencana pembangunan agak terlambat. Cabora Dassa akan menghasilkan 18.000 juta KWH per tahun, jauh lebih besar dari Bendungan Aswan di Mesir yang menghasilkan 10.000 juta KWH setahun. Sebuah danau buatan akan digali sebesar 150 mil, sampai perbatasan dengan Zambia. Proyek raksasa ini akan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, dengan sasaran untuk mentransmigrasikan 1 juta orang Portugal di Mozambik. Di samping itu, Bendungan raksasa ini akan dimanfaatkan juga untuk keperluan industri, bukan saja untuk Mozambik, akan tetapi juga untuk keperluan Afrika Selatan dan Rhodesia.

ANGOLA di pantai Barat Afrika Tengah, luasnya sampai 1.246.700 km persegi dengan penduduk sebanyak 5.438.000 orang, di antaranya 170.000 kulit putih dan 53.000 orang mestizo. Berbeda dengan Mozambik, sektor pertambangan di Angola, terutama setelah tahun 1960, memperlihatkan perkembangan pesat dibandingkan dengan perkembangan di bidang pertanian dan perkebunan.

PERTAMBANGAN (metrik ton)

	1967	1968	1969
Besi	1.154.303	3.218.222	5.477.657
Mangan	33.180	9.150	29.070
Minyak	557.152	749.614	2.457.512
Berlian (carats)	1.288.501	1.607.133	2.021.532

Sumber: AFRICA South of the Sahara 1972, Europe Publication - p. 153.



Dari hasil pertambangan, terutama untuk crude oil terdapat penyilangan yang juga memperlihatkan angka-angka produksi yang naik:

=====

INDUSTRI MINYAK (metrik ton)

=====

	1968	1969
Fuel oil	354.442	389.265
Gas oil	135.452	98.389
Motor spirit	63.882	61.696

=====

Sumber: ibid. . .

Dalam sektor pertanian dan perkebunan, kopi robusta masih merupakan komoditi utama. Kopi diproduksi di daerah-daerah Utara Angola, baik dalam perkebunan-perkebunan yang dikuasai oleh orang-Portugis putih, maupun perkebunan-perkebunan rakyat yang menjual hasilnya di pusat pembelian pemerintah di beberapa tempat. Pada tahun 1968 petani kopi Afrika menjual 70.000 ton kopi seharga 360 juta escudos. Di samping kopi terdapat sisal dan kapas yang dua-duanya tidak begitu maju, mungkin karena turunnya harga di pasaran dunia.

Sangat menarik perhatian bahwa pada tahun 1961 di Angola dimulai pemborontakan oleh gerakan-gerakan kemerdekaan Afrika terhadap Portugal, dan setelah Angola barulah menyusul di Guinea Bissau dan di Mozambik. Akan tetapi di Guinea Bissau dan di Mozambik gerakan kemerdekaan berhasil mempersatukan diri dengan hasil-hasil gemilang. Sebaliknya di Angola gerakan kemerdekaan terpecah dan mungkin karena kemajuan dalam sektor kehidupan rakyat, baik di pertanian kopi, maupun karena diketemukannya sumber-sumber minyak di daerah-daerah Utara, daerah pemborontakan, maka perjuangan kemerdekaan di Angola menjadi lemah.

Ketiga daerah tadi, Guinea Bissau, Mozambik dan Angola telah dikuasai Portugal selama lima abad. Angin liberalisme yang mempengaruhi negara-negara lain di Eropa Barat pada dekade 1920-an, tidak ada pengaruhnya di Portugal. Pada tahun 1933 disyahkan Undang-undang Penjajahan yang dengan tegas menetapkan bahwa daerah-daerah Portugal di Afrika merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari daerah metropolitan di Eropa. Pada tahun 1951, waktu Portugal ingin menjadi anggota PBB, doktrin tahun 1933 disesuaikan dengan iklim dekolonisasi dengan penjelasan bahwa daerah-daerah Portugal di Afrika merupakan bagian integral Portugal, jadi tidak merupakan

Jajahan yang harus dipersoalkan di Dewan Dekolonisasi PBB! Doktrin tadi, pada tahun 1961 diperlunak lagi dengan pernyataan bahwa daerah-daerah Portugal di Afrika merupakan propinsi-propinsi Sabo-rang Lautan negara Portugal!

Akan tetapi "permainan" legislatif oleh Pemerintah Portugal ini tidak dapat membendung arus dekolonisasi yang mulai mempengaruhi bangsa-bangsa Afrika Selatan Sahara. Sejak tahun 1961 di Angola perjuangan kemerdekaan meningkat menjadi perlawanan bersenjata oleh kesatuan-kesatuan MPLA dan Grae. Pada tahun 1963 di Guinea Bissau perjuangan dipimpin oleh gerakan PAIGC di bawah Amilcar Cabral. Sejak tahun 1964 Mozambik mulai dengan Frelimo di bawah Mondlane. Dapat dikatakan bahwa perlawanan bersenjata gerakan-gerakan kemerdekaan di daerah-daerah Portugal di Afrika berkembang dengan baik. Walaupun pemerintah Portugal dalam pernyataan-pernyataannya selalu mengocilkan peranan gerakan kemerdekaan tadi, kondisi keamanan dan ketertiban di daerah-daerah tersebut memaksa Portugal untuk menempatkan lebih banyak angkatan perangnya di Afrika! Pada tahun 1960 Portugal hanya menempatkan beberapa ribu sordadu di Afrika. Pada tahun 1970, hampir segenap kekuatan AP Portugal dikirim ke Afrika untuk memelihara kestabilan dan kesatuan negara. Pada tahun 1970 di Portugal sendiri hanya dipelihara beberapa penataran tetap dan satu divisi AD yang diperbantukan pada NATO. Selainnya 150.000 pasukan, di Angola 55.000, di Mozambik 65.000 dan di Guinea Bissau 35.000, diperkuat dengan sebagian besar AL dan AU, ditambah dengan satuan-satuan polisi dan dinas rahasia, ditempatkan di Afrika. Angka angka dari anggaran belanja Portugal sejak tahun 1964 memperlihatkan peningkatan operasi-operasi Angkatan Perang dan Security dari pemerintah Portugal!

Walaupun pemerintah Portugal dalam menumpas gerakan-gerakan kemerdekaan di Afrika menempatkan makin banyak pasukan-pasukan dan mengeluarkan lebih banyak keuangan, dan walaupun dalam usaha ini, terutama di daerah Angola dan Mozambik, Portugal bekerjasama dengan Afrika Selatan dan Rhodesia, ternyata bahwa kondisi-kondisi di Afrika itu telah menjadi sebab dari penggulingan pemerintah Portugal oleh opsir-opsir Angkatan Perang! Pemerintah baru yang mengakhiri rezim kediktatoran di Portugal, yang telah berkuasa selama 50 tahun dalam program dekolonisasi menunjukkan keinginan untuk segera mengakhiri beban penjajahan. Bila proses dekolonisasi tidak dilaksanakan dengan tepat, maka kondisi di Afrika terutama di Angola dan Mozambik akan tetap merupakan faktor yang menentukan untuk Portugal.



### III. Gambaran umum tentang Afrika bagian Selatan Sahara

Perkembangan yang terjadi di daerah-daerah koloni Portugal itu tentulah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan yang terjadi di Afrika pada umumnya di Afrika bagian Selatan Sahara pada khususnya.

Wilayah Afrika bagian Selatan Sahara pada pertengahan abad XII dikuasai oleh Inggris, Perancis, Belgia dan Portugal. Di samping itu Afrika Selatan dikuasai oleh minoritas kulit putih yang dengan gigih melaksanakan politik apartheid.

Kesatuan-kesatuan administrasi yang disusun oleh penjajah, seperti Afrika Barat Perancis dan Afrika Equatorial Perancis dipecah-pecah menjadi beberapa negara seperti Senegal, Guinea, Ivory Coast, Upper-Volta, Niger, Gabon, Congo-Brazzaville, Chad, Central African Republic. Kesatuan administratif Inggris pada umumnya dilanjutkan sebagai negara merdeka, terkecuali di Afrika Tengah dengan Central African Federation yang pecah menjadi Malawi, Zambia dan Rhodesia. Daerah Belgia, di Congo dilanjutkan sebagai satu negara, sedangkan Rwanda dan Burundi dipecah menjadi dua negara.

Proses balkanisasi ini berakibat bahwa struktur administrasi penjajahan - terutama dari daerah-daerah Perancis - yang sebenarnya sudah kurang akan kader-kader Afrika, dipecah-pecah untuk dapat mengisi keperluan negara-negara yang baru merdeka. Karena itu dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi negara merdeka, pada umumnya pemerintah<sup>2</sup> di wilayah Afrika bagian Selatan Sahara mempunyai alat administrasi yang lemah yang kemudian menjadi retak karena pertentangan-pertentangan antara suku-suku yang ingin menguasai pemerintahan. Karena ternyata, bahwa posisi politis sebagai kepala negara, walaupun terjamin dan terbatas oleh Undang-undang Dasar, dalam kenyataan mencakup political power dan economic power untuk menentukan proyek-proyek yang menguntungkan dan memungkinkan pembagian kekayaan antara warga sukunya. Lebih lagi penghasilan negara pada umumnya habis terpakai oleh korps pegawai negeri yang makin bertambah, untuk membiayai perwakilan-perwakilan negara di PBB, perwakilan di Addis Ababa untuk Organisasi Persatuan Afrika, untuk kedutaan-kedutaan besar di negara-negara bersahabat dan untuk memelihara angkatan perang.

Terkecuali beberapa negara seperti Zambia, Zaire, Nigeria dan Sierra Leone yang memiliki sumber pertambangan seperti tembaga, minyak bumi dan berlian, negara-negara lain semuanya merupakan negara agraris dengan penghasilan dari coklat, kopi, sisal dan

sebagainya, yakni hasil perkebunan yang biasanya dimiliki oleh orang-orang asing. Dari tabel ekspor dapat dipelajari bahwa hasil perkebunan tadi merupakan bagian terbesar dari jumlah ekspor seluruhnya. Perhitungan mengenai Gross Domestic Product didasarkan atas penghasilan perkebunan dan pertambangan. Produksi dari rakyat banyak yang hidup dalam kondisi subsistensi tidak dicakup dalam perhitungan GDP. Bahkan penghasilan pertambangan seperti di Zambia dan di Zaire untuk sebagian besar ditransfer ke negara asal perusahaan-perusahaan asing. Investasi modal asing, di antaranya dari World Bank dan IMF hanya bermanfaat di Zaire. Perkembangan ekspor memperlihatkan trend meningkat. Uang Zaire adalah satu-satunya mata uang Afrika Selatan Sahara yang diakui oleh IMF.

Perkembangan negara-negara Afrika bagian Selatan Sahara setelah mencapai kemerdekaan berlainan sekali dengan cita-cita para pemimpin-pemimpin Afrika yang merupakan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan di zaman penjajahan. Pada tahun 1945, setelah Perang Dunia II berakhir, di Manchester diadakan pertemuan antara pemimpin-pemimpin Afrika dari jajahan Inggris, di Paris para pemimpin-pemimpin Afrika dari daerah penguasaan Perancis juga berkumpul.

Di Manchester, di antaranya hadir Nkrumah dari Ghana, Azikiwe dari Nigeria dan Jomo Kenyatta dari Kenya. Pertemuan di Manchester berpegang pada wawasan politik demokrasi Inggris, ialah pemerintahan yang dipimpin oleh penghidupan politik berdasar demokrasi parlementer agar dapat menjamin setidaknya perwakilan rakyat, peranan serikat-serikat buruh seperti di Inggris dan sebagainya.

Sebaliknya, di Paris, para pemimpin-pemimpin Afrika di antaranya Senghor dari Senegal dan Houphot Boigny dari Pantai Gading hidup dalam alam Perancis pada waktu itu, ialah cita-cita untuk dapat disamakan dengan warga negara Perancis, pemerintahan dengan titik berat pada eksekutif yang kuat seperti de Gaulle dan terutama tetap memelihara hubungan erat dengan negara induk baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan pertahanan.

Dari tabel Coup dan Sistem Pemerintahan dapat dilihat bahwa gejolak-gejolak masyarakat dalam bentuk coup dan perubahan pemerintahan dari sistem multi-parti ke sistem satu partai, tidak terbatas pada negara-negara bekas jajahan Inggris, akan tetapi juga terjadi di negara-negara bekas jajahan Perancis. Bahkan di Zaire (Congo-Kinshasa), bekas jajahan Belgia kemerdekaan disertai dengan perang saudara yang maha dahsyat. Gejala coup dan counter-coup terjadi di negara-negara kecil seperti Dahomey, Togo dan Congo-Brazzaville. Negara-negara besar seperti Nigeria dan Zaire juga mengalami bencana.



sejarah yang berdarah. Baik pemerintahan konservatif seperti Upper-Volta dan Central African Republic, maupun pemerintahan sosialis seperti Ghana dan Mali, begitu juga pemerintahan demokratis seperti di Nigeria dan Sierra-Leone, semua mengalami nasib yang sama. Bahkan di Chad, Perancis mengirimkan pasukan Legiun Asing atas permintaan pemerintah Chad untuk dapat menumpas pemberontakan yang terjadi di negara itu.

=====

NEGARA-NEGARA SELATAN SAHARA DIBAGI MENURUT SISTIM PEMERINTAHAN DAN COUP-COUP

=====

Negara	coup	satu partai	pemerintahan militer
1. Botswana (Inggris)	-	x	-
2. Burundi (Belgia)	x	x	x
3. Cameroon (Inggris + Perancis)	-	x	-
4. Central African Republik (Perancis)	x	x	x
5. Chad (Perancis)	-	x	x
6. Congo Brazzaville (Perancis)	x	x	x
7. Congo-Zaire (Belgia)	x	x	x
8. Dahomey (Perancis)	x	x	-
9. Gabon (Perancis)	x	-	-
10. Gambia (Inggris)	-	x	-
11. Ghana (Inggris)	x	x	x
12. Guinea (Perancis)	-	x	-
13. Ivory Coast (Perancis)	-	x	-
14. Kenya (Inggris)	-	x	-
15. Lesotho (Inggris)	-	x	-
16. Liberia (Inggris)	-	x	-
17. Malagasy (Perancis)	x	-	x
18. Malawi (Inggris)	-	x	-
19. Mali (Perancis)	x	-	x
20. Mauretania (Perancis)	-	x	-
21. Niger (Perancis)	-	x	-
22. Nigeria (Inggris)	x	-	x
23. Rwanda (Belgia)	x	x	x
24. Senegal (Perancis)	-	x	-
25. Sierra Leone (Inggris)	x	x	-
26. Somalia (Italia/Inggris)	x	x	x
27. Sudan (Inggris)	x	x	x
28. Swaziland (Inggris)	-	x	-
29. Tanzania (Inggris)	-	x	-
30. Togo (Perancis)	x	-	x
31. Uganda (Inggris)	x	-	x
32. Upper Volta (Perancis)	x	-	-
33. Zambia (Inggris)	-	x	-
34. Ethiopia	x	-	x

=====

Sumber: AFRICA South of the Sahara 1972. op. cit. dan Politics of the Developing Nations, Fred. R. van der Mehden, N. 9.

Pergolakan masyarakat-masyarakat di Afrika bagian Selatan Sahara tidak dapat dilepaskan dari kondisi rakyat yang untuk 90% lebih hidup dalam taraf subsistensi sebagai akibat pengembangan ekonomi kolonial yang amat pincang. Dalam periode pra-kemerdekaan, penguasa-penguasa kolonial sebenarnya sudah mulai melaksanakan proyek-proyek pertanian, seperti proyek penanaman kacang tanah di bagian Perancis dan di Tanganyika, untuk keperluan kebutuhan akan minyak kacang. Proyek-proyek ini merupakan proyek raksasa dengan alat-alat mekanisasi besar. Misalnya di Tanganyika untuk proyek ini sudah diinvest sebanyak 80 juta dollar, namun ternyata bahwa perencanaan kurang mencakup faktor-faktor iklim, tenaga kerja, baik karena kurang skilled, maupun karena masih hidup sebagai pengembara (nomads); sehingga uang banyak tadi sudah hilang tanpa bekas. Di daerah Perancis proyek ini disebut groundnut scheme dan diceritakan kepada Office di Niger, tetapi investasi sebanyak 200 juta dollar sudah hilang, dan proyek dihentikan.

Dalam sektor perkebunan di daerah Anglo-phone yaitu bekas-bekas koloni Inggris, hanya dua daerah dipandang baik untuk settlement orang putih, ialah Kenya dan Rhodesia. Pada tahun 1950, di Kenya terdapat 7.000 ha yang digarap oleh perkebunan-perkebunan putih. Dengan meletusnya pemberontakan Mau-Mau pada tahun 1953 Jomo Kenyatta sebagai pemimpin suku Kikuyu dibuang ke Kepulauan Seychelles, kemudian dengan kemerdekaan pada tahun 1964 dengan Jomo Kenyatta sebagai Presiden pertama, maka kebanyakan orang putih ingin menjual perkebunan-perkebunannya, karena takut kemungkinan gejolak-gejolak orang hitam. Ternyata bahwa Kenyatta sebagai Presiden dapat meyakinkan pemerintah Inggris bahwa peralihan perkebunan dari tangan putih ke tangan hitam tidak akan merugikan kepentingan Inggris. Maka sejak tahun 1970 pemerintah Inggris memberi bantuan kepada Kenya untuk membayar kompensasi pada pengusaha-pengusaha Inggris. Dengan politik ekonomi yang sukses tadi, dengan infra-struktur kekuasaan dalam tangan suku Kikuyu, diperkuat dengan adanya satu batalyon tentara Inggris, yang melakukan "latihan" terus-menerus, maka Kenya di mata orang Barat merupakan sukses.

Di negara-negara Franco-phone, yakni bekas-bekas koloni Perancis pada umumnya ikatan dengan Perancis tetap dipelihara, baik di bidang ekonomi, politik, pertahanan maupun kebudayaan. Kurikulum sekolah-sekolah di negara-negara Franco-phone tetap menggunakan buku-buku Perancis yang dicetak di Perancis. Benar-benar penghasil devisa untuk Perancis yang tidak dapat diabaikan. Di



bidang ekonomi pola lama dipertahankan dengan penghasilan cacao, kacang tanah, kelapa dan sebagainya. Diketemukannya uranium di Niger membawa perubahan investasi dengan masuknya modal Jepang.

Gejala lain adalah usaha beberapa pemimpin Afrika, yang tertarik oleh pelajaran-pelajaran komunis untuk melaksanakan "State farms", seperti terjadi di Ghana dan Guinea. Baik di Ghana, maupun di Guinea, proyek "State farms" menemui kegagalan, walaupun mulanya kedua pemerintah dengan bangga mengumumkan bahwa jumlah State farms telah bertambah dari 26 pada tahun 1962, menjadi 107 pada tahun 1963, dan pada tahun 1966 menjadi 135 farms dengan 20.000 buruh. Proyek ini, seperti proyek kacang tanah yang dilaksanakan oleh penjajah, menandakan ketidak-sabaran dari penguasa pada periode-periode tadi, dalam menghadapi kondisi subsistensi kebanyakan penduduk. Baik proyek sosialis dari Sekou Toure dan Nkrumah, maupun proyek penjajahan tidak mencakup perhitungan mengenai gap antara subsistence farming dengan mechanized farming. Ada pula pembangunan yang didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi. Suksesnya gerakan koperasi di Eropa Barat, terutama di Inggris dan di Skandinavia ternyata belum dapat berhasil di benua Afrika. Walaupun terdapat sifat komunal, misalnya pemeliharaan ternak dalam bidang produksi dan pembagian hasil produksi secara komunal, namun kenyataan dalam masyarakat Afrika asli masih tetap didasarkan atas hasil produksi secara pribadi, misalnya dalam famili-famili poligam, walaupun tidak terdapat pembagian tanah karena tanah pada umumnya masih kosong, tiap isteri menggarap tanah sendiri untuk keperluan pribadi dan anak-anaknya.

Pola pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dilaksanakan terutama di Tanzania. Namun dalam pelaksanaannya, berdasarkan pengalaman bahwa koperasi dalam masyarakat Afrika yang miskin tidak dapat menghadapi perusahaan-perusahaan dagang yang pada umumnya berada di tangan asing, maka prinsip koperasi di Tanzania dikembangkan menjadi sistim Ujamaa - Gotong Royong - di mana kerjasama di bidang ekonomi diperkuat dengan kegotong-royongan dalam bidang politik; mulai dari tingkat desa sampai pada tingkat pusat. Tekad bangsa Tanzania untuk dapat melanjutkan hidup didasarkan pada kesadaran bahwa negerinya miskin, tidak memiliki kekayaan alam, karena itu satu-satunya jalan adalah untuk bekerja keras dalam batas-batas kemampuan sendiri. Cita-cita sederhana tadi, diajukan oleh Presiden Nyerere pada tahun 1966. Pada tahun 1967 diterima Arusha Declaration, program politik yang menjadi dasar pembangunan selanjutnya. Di Tanzania memang kelihatan bahwa pemerintahnya dengan konsekwen melakukan investasi di daerah-daerah dan tidak di kota-kota.

Sekarangpun sudah kelihatan, bahwa program Tanzania untuk mengutamakan kemajuan rakyat di daerah-daerah mulai membawa sukses. Ini dapat membangkitkan gerakan rakyat-rakyat lain di Afrika, di mana pembangunan masih tetap diutamakan untuk elite kecil dan pengusaha-pengusaha asing.

#### IV. Cita-cita kerjasama regional

Pemerintah-pemerintah semua negara Afrika Selatan Sahara harus menyelesaikan masalah penghidupan penduduk yang miskin dengan resources yang belum dapat dimanfaatkan untuk rakyat banyak. Saingan yang pernah ada antara daerah Franco-phone dan daerah Anglo-phone, dan selanjutnya adanya daerah-daerah yang dikuasai Belgia dan Portugal, pada umumnya masih tetap berlaku. Bahkan Guinea waktu ke luar dari pengaruh Perancis, segera menerima investment Amerika Serikat. Monopoli Belgia di Zaire sudah diganti oleh modal Amerika dan Jerman Barat. Walaupun diharapkan bahwa dengan kemerdekaan akan timbul zaman kerjasama antara negara-negara Afrika merdeka, namun kerjasama regional belum dapat memenuhi harapan.

Pada tahun 1961 di Casablanca diadakan konperensi antara kepala-kepala negara dari Maroko, Guinea, Mali, Aljazair dan Lybia. Pada tahun 1961 diadakan juga konperensi di Monrovia, dihadiri oleh 19 negara. Antara group Casablanca dan group Monrovia tidak terdapat kerjasama, bahkan digambarkan seolah-olah ada pemisahan antara negara-negara "revolutioner" dan group yang "non-revolutioner".

Pada bulan September 1961 di Tananarive ditandatangani Charter Union Africaine et Malgache, yang kemudian pada tahun 1965 menjadi Organization Commune Africaine et Malgache (OCAM). Dari ketiga kerjasama regional tadi hanya OCAM masih ada, bahkan dengan Yaounde Convention pada tahun 1963, semua negara OCAM menjadi associate members dari PBE. Lain daripada itu, antara negara-negara Franco-phone masih terdapat kerjasama dalam bidang Bea Cukai antara negara-negara di Afrika Barat dan satu organisasi untuk negara-negara Afrika Central. Untuk keperluan penjualan gula organisasi OCAM diperkuat lagi dengan Mauritius, sehingga OCAM menjadi OCAMT.

Untuk daerah Anglo-phone, sobelum kemerdekaan Inggris telah meletakkan dasar kerjasama regional di Central African Federation yang pada tahun 1964 pecah menjadi Rhodesia, Malawi dan Zambia. Sekarang Rhodesia mendekati Afrika Selatan, karena sama-sama putih,



Malawi memelihara hubungan ekonomi dengan Afrika Selatan, karena banyak buruh Malawi menjadi buruh di industri Afrika Selatan. Dan Zambia sedang meletakkan dasar kerjasama dengan Tanzania, misalnya dalam pembuatan Tanzam railway yang akan memungkinkan ekspor Zambia melalui pelabuhan-pelabuhan di Tanzania. Railway ini dibuat dengan kredit RRC, setelah usaha Tanzania dan Zambia untuk mendapat kredit dari Inggris dan dari Worldbank gagal. Sejarah pembuatan Bendungan Aswan di Mesir yang dibuat oleh Soviet, setelah Worldbank mengundurkan diri, terulang kembali dalam pembuatan Tanzam railway.

Di Afrika Timur, Inggris telah meletakkan dasar untuk East African Community yang merupakan gabungan antara satu negara kaya, Kenya, dengan dua negara yang miskin, Uganda dan Tanzania. Dilihat dalam struktur organisasinya, EAC sangat mengagumkan. Ada East African Harbour organization, East African Railway, East African Airways, East African Post and Telecommunication Corporation dan sebagainya, semuanya dibina oleh East African Authority, yang terdiri dari Kepala-kepala Negara ketiga anggota menggambarkan kerjasama regional yang sangat baik. Waktu timbul perselisihan pandangan karena Presiden Uganda digulingkan oleh Jendral Idi Amin, Secretariat East African Community tetap berjalan, untuk dapat memelihara kontinuitas pekerjaan Authority. Tetapi dengan adanya krisis ekonomi di seluruh dunia, maka pihak Kenya mulai merenggangkan ikatan-ikatan, misalnya dengan melepaskan diri dari East African Customs Corporation. Disebabkan oleh pertentangan-pertentangan politik selanjutnya, ditambah lagi dengan chaos di Uganda dan pembangunan di Tanzania yang dititikberatkan pada desa-desa, perkembangan EAC tidak lagi semantap seperti semula.

Pada tahun 1963 didirikan Organization of African Unity - OAU. Dihadiri oleh 41 negara, terdiri dari semua negara-negara Arab, semua negara-negara Afrika Selatan dan Rhodesia. Topics yang dibicarakan adalah:

- Pembentukan Organisasi Negara-negara Afrika.
- Kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, ilmiah, pertahanan bersama.
- Dekolonisasi.
- Apartheid dan diskriminasi rasial.
- Aspek-aspek untuk pembentukan kelompok-kelompok ekonomi regional.
- Afrika dan PBB

Dari pembicaraan antara Kepala-kepala Negara yang berkumpul di bawah naungan OAU timbul rumusan mengenai tujuan dan usaha sebagai berikut:

- "- To promote unity and solidarity among African States.
- "- To coordinate and intensify their efforts to improve living standards in Africa.
- To defend their sovereignty, territorial integrity, and independence.
- To eradicate all forms of colonialism from Africa.
- To promote international cooperation, having due regard to the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human rights."

Solidaritas negara-negara Afrika terutama menonjol di bidang politik; di forum internasional seperti di PBB, dalam konperensi-konperensi Non-aligned dan sebagainya. Afrika pada umumnya ke luar dengan satu suara. Solidaritas didasarkan atas perjuangan Afrika melawan sisa-sisa kolonialisme di Afrika, terutama dalam bentuk apartheid dan diskriminasi rasial yang berlaku di Afrika Selatan, Rhodesia dan daerah-daerah Portugal. Walaupun solidaritas dalam hal voting telah berhasil membuat PBB menelorkan resolusi untuk mengu- tuk politik apartheid, bahkan berhasil mengadakan embargo terhadap Afrika Selatan, Rhodesia dan daerah-daerah Portugal, kenyataan ma- sih menunjukkan bahwa beberapa anggota PBB, terutama Perancis de- ngan penjualan kapal-kapal selam dan persenjataan lain, selanjut- nya Jepang yang mempunyai neraca perdagangan dengan Afrika Selatan sebesar 1 milyar dollar, tidak menghiraukan resolusi-resolusi PBB. Begitu pula Resolusi PBB yang menentukan South West Africa sebagai mandat PBB harus ditempatkan di bawah pengawasan PBB tidak dihirau- kan oleh Afrika Selatan, bahkan sudah mulai diinkorporasikan dalam Afrika Selatan.

Perlu disadari juga bahwa kohesi politik dari negara-negara Afrika bagian Selatan Sahara di PBB pernah mengeluarkan suara abstain dalam perdebatan mengenai soal Irian Barat. Motivasi blok Afrika didasarkan atas kenyataan di Afrika, di mana dalam referen- dum perlu dikeluarkan one man one voto, agar terdapat precedent untuk voting di daerah-daerah Afrika yang masih dijajah, yang me- mungkinkan mayoritas dapat mencapai kemenangan mutlak. Juga dalam forum Non-aligned blok Afrika diperkuat dengan negara-negara Karibia, dan makin lama dapat merupakan mayoritas terhadap persoalan-persoalan di mana Indonesia mempunyai pendirian yang



berlainan dengan blok Afrika. Pengalaman di Georgetown, Kabul dan Aljazair cukup meyakinkan bahwa kohesi negara-negara Afrika dalam forum politik Internasional merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan.

#### V. Pengaruhnya terhadap Mozambik, Angola dan Guinea Bissau

Dalam pelaksanaan untuk menghancurkan penjajahan di bumi Afrika, dibentuklah sebuah Liberation Committee yang berkedudukan di Daressalaam - Tanzania. Komite ini sebenarnya merupakan semacam Joint Headquarters for Liberation, namun kenyataan menunjukkan bahwa Liberation Committee ini tidak efektif, karena terpecah antara pejabat-pejabat yang memang ditunjuk oleh beberapa negara, akan tetapi selalu bertengkar mengenai kepentingan-kepentingan pribadi. Sebaliknya, berlainan dengan negara-negara Afrika merdeka di mana pada umumnya terdapat sistem satu partai, maka di daerah-daerah yang masih dijajah selalu terdapat dua gerakan kemerdekaan, misalnya untuk Rhodesia terdapat Zimbabwe African National Union dan Zimbabwe African People's Union - ZANU dan ZAPU. Di Angola terdapat IPLA dan GRAE, di Afrika Selatan Pan African Congress dan African National Congress. Tidak mengherankan bahwa fihak-fihak ketiga selalu berusaha untuk "menarik" salah satu dari Freedom movements di bawah naungannya. Untuk daerah-daerah itu maka freedom movements lebih berarti sebagai lobby di Daressalaam, Lusaka, Cairo dan Aljazair daripada gerakan yang benar-benar merupakan kesatuan-kesatuan bertempur di daerah masing-masing. Keadaan di Guinea Bissau dan di Mozambik berlainan sekali. Di Guinea Bissau gerakan kemerdekaan dibina oleh PAIGC - Partido Africano da Independencia da Guinea e Cabo Verde, di bawah pimpinan seorang pemimpin Amilcar Cabral, seorang lulusan Universitas di Lisbon. Gerakan ini disokong penuh oleh Guinea di bawah Sekou Toure. Walaupun Amilcar Cabral dibunuh pada tahun 1972, namun PAIGC berhasil melanjutkan perang gerilya dengan membebaskan sebagian besar dari Guinea Bissau. Hal ini disaksikan oleh sebuah komisi PBB yang dalam laporannya meyakinkan bahwa Guinea Bissau telah menguasai daerah, mempunyai pemerintahan dan merupakan negara merdeka. Blok Afrika, blok Sosialis dan beberapa negara non-aligned termasuk Indonesia pada bulan September 1974 mengakui Guinea Bissau sebagai negara merdeka.

Begitupun di Mozambik. Bantuan sepenuhnya yang diberikan oleh Tanzania dan Zambia, kenyataan adanya pasukan-pasukan gerilya di dalam wilayah Mozambik, adanya daerah bebas, seperti disaksikan

oleh beberapa wartawan Inggris, Amerika dan Perancis menunjukkan kebenaran dalih bahwa gerilya dapat berhasil, bila ada negara tetangga yang baik, ada organisasi yang kokoh dan ada pimpinan yang gigih.

Kertumbuhan doktrin perjuangan baik di Guinea Bissau, maupun di Mozambik untuk sementara waktu sangat terpengaruh oleh faktor-faktor anti-penjajahan dan faktor-faktor pembangunan daerah-daerah bebas yang dititikberatkan pada pembangunan desa-desa dalam sistim pertahanan rakyat yang tadinya tidak diperhatikan oleh pemerintah kolonial.

## VI. Benteng Putih di Afrika bagian Selatan

Sebelum Portugal melaksanakan dekolonisasi di Afrika, maka daerah-daerah Angola dan Mozambik merupakan bagian dari Benteng Putih di Afrika bagian Selatan, yang terdiri dari Afrika Selatan, Rhodesia, Angola dan Mozambik. Walaupun penduduk kulit putih di Angola dan Mozambik merasa terikat oleh pusat induk di Eropa, tau-fan kemerdekaan yang mengembus di Afrika bagian Selatan Sahara yang menghasilkan negara-negara merdeka di bawah pemerintahan yang berkulit hitam, dirasakan sebagai bahaya oleh orang kulit putih yang berkuasa di Afrika Selatan, di Rhodesia, di Angola dan di Mozambik. Kondisi mental yang dimiliki oleh golongan kulit putih, yang merupakan minoritas itu, bersumber di Afrika Selatan yang melaksanakan secara tegas politik "apartheid" untuk menjamin kedudukan minoritas putih terhadap mayoritas hitam.

Pada pertengahan abad XVII, armada-armada Belanda dalam pelayaran dari Nederland ke dan dari Indonesia mendirikan sebuah pelabuhan di Tanjung Harapan untuk dapat beristirahat, untuk menambah air dan perbekalan-perbekalan yang diperlukan untuk awak-awak kapal. Pelabuhan kecil ini, lalu meluas menjadi daerah transmigrasi orang-orang Belanda yang karena iklim baik dapat melaksanakan pertanian. Pendatang-pendatang Belanda ini beragama Calvin atau Luther yang dalam penghidupan sehari-hari selalu berpegang pada Buku Injil, yang mengatakan bahwa orang-orang hitam di Afrika adalah keturunan Ham, anak terkutuk dari Nabi Nuh. Karena itu, bagi orang-orang Belanda tadi orang-orang hitam pantas dijadikan budak. Pada tahun 1717 VOC (Verenigde Oost-Indie Compagnie) yang menguasai pelayaran dan pelabuhan-pelabuhan dalam perjalanan antara Nederland dan Indonesia, menentukan bahwa daerah di Afrika Selatan untuk selanjutnya dikembangkan dengan sistim perbudakan. Sejak saat itu



bagi penduduk Afrika Selatan terdapat garis pemisah yang tegas, antara agama Kristen, kekayaan dan kekuasaan pada satu pihak, sedang pada garis sebaliknya terdapat warna hitam yang berarti kebodohan, kemiskinan dan perbudakan. Kondisi mental ini dapat bertahan dan berkembang karena masyarakat putih di Afrika Selatan hidup tersendiri, terpisah dari perkembangan pemikiran di Eropa. Ketika pada akhir abad XVIII dan pada abad XIX Inggris mulai datang di Afrika Selatan, maka golongan Belanda yang kolot pikiran pindah ke pedalaman di Transvaal dan Oranye Vrij-Staat yang menjadi negara-negara yang menentang Inggris. Dengan diketemukannya emas di daerah Transvaal dan Oranye Vrij-Staat, isolasi orang-orang Boer tidak dapat dipertahankan lagi. Setelah melakukan perang pada permulaan abad XX, Inggris menduduki seluruh Afrika Selatan. Namun demikian kondisi mental orang-orang Boer dapat bertahan, bahkan dapat berkembang, sehingga pada tahun-tahun 1950-an, partai Nasionalis, yang merupakan partai orang Boer, dapat menang dalam pemilihan umum. Sejak itu, cita-cita apartheid yang ditanam bibitnya pada tahun 1717, menjadi realitas di dalam policy pemerintah Afrika Selatan dituangkan dalam undang-undang dan pengawasan polisi yang ketat.

Penduduk Afrika Selatan menurut sensus tahun 1970, terdiri dari 15.900.000 jiwa, dibagi dalam 3.000.000 kulit putih, 10.900.000 Bantu (orang hitam), 1.500.000 Coloureds dan 800.000 orang Asia (India dan Pakistan).

Pemerintah Afrika Selatan yang terdiri dari minoritas putih, yang hanya merupakan 17,8% dari jumlah seluruhnya, telah mengadakan pemisahan tegas antara putih dan non-putih. Kedua golongan tadi, menurut teori rasialisme, akan menempuh "separate development" .. pembangunan sendiri-sendiri. Dalam pelaksanaan ternyata bahwa mayoritas Afrika yang merupakan 60% dari penduduk ditransmigrasikan ke dalam daerah yang luasnya hanya 14% dari segenap areal tanah Republik Afrika Selatan. Bahkan tanah yang ditentukan tadi, merupakan tanah yang pada umumnya gersang. Daerah-daerah yang khusus ditentukan untuk penduduk-penduduk Afrika dinamakan "Bantustans". Dalam daerah-daerah tertutup tadi, orang-orang Afrika dapat hidup "bebas" dan dapat mengadakan "pemerintahan dan pembangunan" sesuai dengan cita-citanya. Sebaliknya ekonomi Afrika Selatan, yang seluruhnya dikuasai oleh minoritas putih berkembang dengan pesat. Dari ekonomi pertanian pada abad XVII, sampai dengan penemuan berlian dan emas pada pertengahan abad XIX menyebabkan kedatangan Inggris yang berakibat bahwa pada abad XX Afrika Selatan menjadi bagian



Kerajaan Inggris. Sampai sekarang produksi emas Afrika Selatan mencapai 80% dari produksi emas dunia - tidak diperhitungkan produksi emas di blok Soviet. Di samping emas dan berlian, Afrika Selatan ternyata memiliki sumber-sumber bijih besi, batu bara, platina, asbestos dan uranium dalam jumlah besar. Di samping itu terdapat tembaga, seng dan timah hitam. Yang belum diketemukan, walaupun pemerintah Afrika Selatan telah mengeluarkan jutaan untuk eksplorasi, adalah minyak bumi dan bauksit.

Untuk mengolah sumber-sumber pertambangan telah didirikan industri-industri ringan, sedang dan berat. Afrika Selatan adalah satu-satunya negara di benua Afrika yang dapat memproduksi dan mengekspor barang-barang hasil industri. Gross Domestic Product antara 1960 dan 1970 meningkat sampai dua kali, menunjukkan growth yang mencapai 9% per tahun. Gross Domestic Product pada tahun 1969 mencapai R. 11.635 juta atau R. 503 per capita. Angka-angka ini jauh melampaui angka-angka dari negara-negara Afrika lainnya. Namun distribusi pendapatan tidak seimbang, bila diadakan perbandingan antara penghasilan golongan putih dan golongan hitam, misalnya dalam bidang pertambangan gaji seorang buruh putih adalah 16 kali seorang buruh hitam, dalam industri ratio mencapai 6 kali lebih besar. Perkembangan industri dan pertambangan di Afrika Selatan membawa kenaikan dalam kebutuhan akan buruh. Buruh kasar didatangkan dari Mozambik, Malawi dan dari Angola. Kebutuhan akan skilled labour menimbulkan kesulitan lebih besar, karena pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh pemerintah Afrika Selatan dalam pendidikan kejuruan dan Universitas-universitas, untuk golongan hitam.

Politik Apartheid dari pemerintah Afrika Selatan yang dikuasai oleh keturunan Boer mendapat tantangan dari mayoritas Afrika dan dari golongan-golongan kulit berwarna lain. Dalam hal ini terutama menonjol organisasi-organisasi seperti African National Congress, South African Indian Congress dan The Coloured Peoples Political Organization. Bahkan ada golongan kulit putih yang tergabung dalam White Congress of Democrats yang bersama-sama dengan organisasi orang-orang berwarna tadi pada tahun 1955 menyusun Freedom Charter yang merumuskan dasar-dasar untuk suatu masyarakat demokratis dan non-rasial. Pada tahun 1956 pemerintah menangkap lebih dari 150 tokoh-tokoh yang menandatangani Freedom Charter tadi. Di muka pengadilan mereka dituduh "makar untuk menggulingkan pemerintah yang syah". Pengadilan perkara ini berlangsung sampai tahun 1961 dengan hasil bahwa semua tertuduh dibebaskan. Akan tetapi, sementara itu, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang sangat membatasi.



kehidupan gerakan-gerakan anti-apartheid. Tindakan-tindakan represif di antaranya mengharuskan tiap orang Afrika di atas umur 16 tahun membawa semacam kartu penduduk yang memudahkan kontrol polisi terhadap orang-orang Afrika. Pada tahun 1960 meletus pemberontakan di daerah Pono Timur menentang pengangkatan kepala-kepala suku oleh pemerintah. Pada tahun 1960 polisi menembak secara membabi buta terhadap massa di Sharpeville, yang mengadakan protes terhadap kewajiban untuk membawa kartu penduduk. Peristiwa Sharpeville ditambah dengan larangan terhadap aktivitas politik oleh golongan Afrika meningkatkan public opinion dunia terhadap apartheid Afrika Selatan. Karena reaksi dunia, maka pada tahun 1961 Afrika Selatan tidak menjadi anggota Commonwealth Inggris. Pada tahun 1963 negara-negara Afrika berhasil di PBB mengeluarkan resolusi pengkutukan terhadap politik Afrika Selatan dan menganjurkan semua negara-negara anggota PBB untuk memboikot Afrika Selatan selama politik apartheid masih dilaksanakan.

Perkembangan Afrika Selatan sejak 1910, yaitu tahun berdirinya Union of South Africa dengan struktur ekonomi bertitik berat pada agraria, sampai pada tahun 1970-an dengan struktur ekonomi yang lebih didasarkan pada pertambangan dan industri, menempatkan Republik Afrika Selatan sebagai intermediate industrial power yang merupakan realitas bukan saja dalam kedudukannya antara negara-negara industri lainnya akan tetapi juga dalam kedudukan sebagai satu-satunya negara di benua Afrika yang mempunyai kemampuan industri dan pertambangan. Dalam hal ini bagi Afrika Selatan akan timbul persoalan pasaran untuk barang-barang industri dan manpower untuk pertambangan dan industri yang sedang meluas. Dalam keadaan yang dengan cepat membawa perubahan-perubahan ke arah kemerdekaan Afrika, maka bagi Afrika Selatan sebagai suatu kekuatan di benua Afrika tidak ada jalan lain daripada mencari perumusan untuk menyesuaikan diri dengan Afrika Hitam yang merdeka.

Isolasi terhadap Afrika Selatan yang mula-mulanya dijadikan putusan PBB, kemudian dalam sidang-sidang berturut-turut dari CAU di Addis Abeba merupakan perhatian utama dari semua negara-negara Afrika, kemudian di Konferensi Non-Aligned di Lusaka diambil keputusan agar Afrika Selatan diboikot, lambat laun membawa perubahan politik dalam tubuh pemerintah Afrika Selatan, hal mana disebabkan oleh tekanan luar negeri, peningkatan aktivitas gerilya di Rhodesia, Angola dan Mozambik dan secara intern karena kekalahan sayap kolot dan kemenangan sayap "vorlighte" dalam Nationalist Party pada pemilihan umum tahun 1970. Walaupun partai oposisi United Party juga mencapai tambahan kursi dalam parlemen, namun



politik pemerintah Afrika Selatan masih tetap mempertahankan politik apartheid terhadap mayoritas hitam dengan segala peraturan-peraturan yang ketat, sementara politik baru yang dirumuskan adalah bahwa politik - outward policy - terhadap negara-negara Afrika bagian Selatan Sahara hendaknya merupakan jaminan untuk kepentingan ekonomi Afrika Selatan dengan mengajak negara-negara Afrika bagian Selatan Sahara mengadakan dialog untuk menyelesaikan pertikaian. "Dialog" hanya diterima oleh Malawi, Mauritius, Cote d'Ivoire dan Madagaskar. Presiden Malawi Banda mengunjungi Afrika Selatan sebagai Presiden Hitam yang pertama dan disambut sebagai tamu kehormatan, sebagai seorang Putih Kehormatan. Namun dialog tidak dapat dilanjutkan, karena di Madagaskar pemerintah yang pro dialog di bawah Tsirarana digulingkan oleh pemerintah militer yang lebih mengarah ke politik Afrika Hitam. Malawi merubah tekad untuk dialog sejak gerilya yang menuju Rhodesia dan Mozambik melalui daerah Malawi. Ancaman gerilya untuk menghancurkan jalan kereta api di Malawi rupanya sangat berguna, karena gerilya Frelimo telah menghancurkan kereta api di Mozambik di beberapa tempat.

Dengan proses dekolonisasi Portugal, Mozambik telah mempunyai pemerintah transisi dengan Frelimo sebagai unsur pokok, di Angola dekolonisasi hanya merupakan soal waktu saja. Rhodesia, tergantung pada Mozambik untuk menyalurkan barang-barang ekspor dan impornya. Jalan menuju Afrika Selatan harus melalui Botswana, yang sekarang juga mulai memperlihatkan jiwa Afrika-nya. Sir Seretse Khama, Presiden Botswana menyatakan bahwa ia mempertimbangkan untuk mengambill alih jalan kereta api, yang tadinya merupakan perusahaan Afrika Selatan.

Komposisi penduduk di Rhodesia memperlihatkan bahwa perbandingan antara penduduk hitam dan putih adalah 20 : 1. Minoritas putih sejak 1965 menyatakan kemerdekaan sefihak - Unilateral Declaration of Independence - terhadap pemerintah Inggris. Perselisihan terjadi karena posisi Inggris yang minta jaminan agar penduduk hitam dapat cukup wakil-wakil dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pada lain fihak posisi minoritas putih dalam organisasi Front Rhodesia yang menyatakan bahwa Inggris harus menyerahkan kemerdekaan dulu, baru akan di"atur" mengenai kedudukan penduduk hitam dan dewan-dewan perwakilan rakyat. Perselisihan tidak mencapai penyelesaian. Inggris tidak mau mempergunakan kekerasan untuk menumpas pemberontakan minoritas putih, gerakan gerilya sejak 1967 makin meningkat, akan tetapi dengan operasi bersama dari tentara Rhodesia dan Afrika Selatan gerilya dapat dihalau. Pada tahun 1971, pemerintah Rhodesia dan Inggris mencapai persetujuan yang mencakup bahwa jumlah orang-orang



Afrika dalam dewan-dewan akan bertambah dengan bertambahnya pendapatan per capita. Inggris akan turut serta dengan Rhodesia dalam proyek untuk pembangunan dan pendidikan sejumlah 100 juta poun sterling. Inggris dan Rhodesia setuju bahwa settlement ini akan diselidiki oleh sebuah Commission di bawah Lord Pearce. Di luar dugaan pemerintah Rhodesia dan Inggris, penduduk Afrika di Rhodesia menolak "settlement" yang digariskan oleh Inggris dan pemerintah Rhodesia.

Walaupun pada tahun 1968 PDB menentukan resolusi agar Rhodesia dikenakan embargo, namun ekonomi Rhodesia berkembang terus. Dasar-dasar ekonomi yang tadinya berdasar perkembangan tembakau dan pertambangan batu bara, sejak blokade Inggris lebih diletakkan pada perkembangan industri yang ditujukan terhadap kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan akan minyak bumi yang sedianya dicukupi melalui Beira di Mozambik, walaupun impor dari Beira dihentikan, masih tetap dapat dipenuhi.

Benteng Putih di Afrika bagian Selatan, yang tadinya mau dibangun terhadap kemerdekaan orang-orang hitam dengan batas Utara di Sungai Zambesi, dengan Republik Afrika Selatan sebagai inti dan Rhodesia, Angola dan Mozambik sebagai periferi, sekarang mulai runtuk. Cita-cita pada tahun 1950 dan seterusnya untuk mendirikan sebuah Common Market antara empat negara tidak pernah menjadi realitas. Operasi bersama untuk menghancurkan gerilya di Angola, Mozambik dan Rhodesia dengan tujuan search and destroy tidak dilaksanakan lagi. Bahkan, waktu di Laurence Marques beberapa ratus orang putih mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah hitam di Mozambik, Afrika Selatan tidak memberi bantuan.

Rhodesia telah menjalankan tindakan-tindakan preventif dengan mengisolir suku-suku dekat perbatasan dengan Zambia dalam resettlement camps. Sebaliknya, baik dari perdana menteri Afrika Selatan, Vorster, maupun oleh Presiden Zambia diadakan anjuran, agar Rhodesia menyesuaikan diri dengan iklim kemerdekaan Afrika, agar Zimbabwe - nama Afrika untuk Rhodesia diberi kemerdekaan dengan pemerintah hitam.

Pemerintah Afrika Selatan masih tetap pada pendirian bahwa perkembangan dalam negeri dengan rasialisme untuk mencapai separate development adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan kelanjutan Republik Afrika Selatan. Pemerintah Afrika Selatan berkeyakinan bahwa negara-negara Afrika Hitam akhirnya akan menerima realitas Afrika Selatan, terutama sebagai raksasa ekonomi yang memerlukan produksi industri Afrika Selatan.

Reaksi negara-negara Afrika Dagian Selatan Sahara terhadap Afrika Selatan tetap menolak politik rasialisme dan apartheid. Negara-negara Afrika Dagian Selatan Sahara menolak pembentukan masyarakat multi-rasial, seperti pernah diusahakan Inggris di Kenya, Uganda dan Tanzania. Multi-rasialisme membawa apartheid. Pengkutukan-pengkutukan di forum seperti di PBB, di OAU dan di Non-Aligned, disertai dengan adanya proses dekolonisasi Portugal telah membawa persoalan agar Afrika Selatan dikeluarkan dari PBB. Akibat, walaupun di Sidang Umum PBB usul tadi pasti akan diterima, namun di Dewan Keamanan, walaupun 7 negara setuju, 3 negara menyatakan tidak setuju. Tiga negara kobetulan adalah negara yang mempunyai hak veto, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Dapat digambarkan betapa besar kekecewaan dari orang-orang Afrika.

#### VII. Catatan akhir: Benua Afrika masih akan bergolak terus

Dari ulasan di atas dapat dilihat bahwa dekolonisasi Portugal di Afrika merupakan babak lanjutan dalam scenario konfrontasi antara kulit hitam terhadap kulit putih, antara politik rasialisme, apartheid dan penjajahan terhadap cita-cita kemerdekaan bangsa-bangsa Afrika Hitam yang ingin merdeka, yang memperjuangkan penghidupan layak berdasarkan peri kemanusiaan dalam batas-batas masing-masing negara. Scenario ini dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor global dan benua dan sebaliknya perkembangan scenario ini akan dapat mempengaruhi tata tertib dunia.

##### 1. Negara-negara Arab

Perjuangan bangsa-bangsa Arab, terutama di Aljazair dan di Mesir, dulu merupakan pendorong bagi pemimpin-pemimpin Afrika lainnya. Dalam konfrontasi antara Afrika Hitam terhadap Afrika Putih, negara-negara Arab selalu memberi dukungan politis kepada negara-negara hitam. Sebaliknya, secara politis negara-negara Afrika Dagian Selatan Sahara pada umumnya memberikan sokongan kepada perjuangan Arab melawan Israel. Kerjasama politis dipelihara di PBB, dalam forum OAU dan di forum Non-Aligned. Kerjasama militer terjadi di Nigeria. Waktu Biafra ingin memisahkan diri dari Nigeria, Mesir memberikan bantuan militer kepada pemerintah pusat. Dalam Liberation Committee di Daressalaam wakil-wakil Mesir memegang peranan



penting. Peranan Libya dengan menjanjikan bantuan uang kepada beberapa negara Afrika Bagian Selatan Sahara telah mengakibatkan beberapa negara Afrika Bagian Selatan Sahara memutuskan hubungan dengan Israel, di antaranya di Uganda.

Bantuan negara-negara Arab di bidang ekonomi hampir tidak ada, terkecuali untuk pengembangan kebudayaan dan pendidikan seperti di Sudan.

Dalam hal perkembangan di daerah-daerah Portugal di Afrika, faktor Arab akan terasa di daerah Mozambik. Di dalam Liberation Committee akan mengintensifkan perjuangan gerilya di Rhodesia, atau dengan memakai nama Afrika, di Zimbabwe. Di bidang ekonomi, terutama mengenai kebutuhan minyak bumi, Mozambik mempunyai sumber batu bara dan Bendungan listrik di Cabora Bassa. Di bidang politik faktor Arab akan berguna, baik dalam melanjutkan perjuangan untuk menentang apartheid Afrika Selatan dan Rhodesia, maupun sebaliknya dalam dukungan Afrika terhadap Arab dalam konfrontasi melawan Israel. Tetapi, kenaikan harga minyak, yang menguntungkan Arab dan merugikan Afrika Hitam merupakan faktor penting yang perlu diperhitungkan sebagai faktor peranan Arab di Afrika.

## 2. Investment modal asing

Kalau di zaman penjajahan Afrika dibagi habis antara negara-negara Eropa, yang masing-masing mengkhususkan "miliknya" untuk pengusaha-pengusaha bangsa penjajah masing-masing, maka semula kondisi tadi oleh pengusaha-pengusaha Eropa ingin dilanjutkan. Perancis dapat melanjutkan kondisi tadi di sebagian besar bekas jajahan, yang mula-mula menjadi anggota community Perancis, kemudian dalam beberapa organisasi regional, ditambah dengan perjanjian-perjanjian bilateral dengan memelihara ikatan ketat, baik di bidang politik, hankam dan di bidang ekonomi. Guinea di bawah Sekou Toure menolak menjadi anggota Community Perancis. Dengan ditemukannya bauksit dan bijih besi, modal Amerika Serikat dan Jerman Barat menggantikan modal Perancis. Guinea Bissau sebagai tetangga Guinea diperkirakan juga mempunyai mineral-mineral yang sampai sekarang belum dikerjakan. Apakah modal Amerika dan Jepang akan masuk?

Di Zaire, yang kaya dengan mineral, di waktu penjajahan, modal raksasa ditanam oleh Union Miniere, sebuah perusahaan Belgia. Dengan kemerdekaan timbullah kekacauan dan perang saudara. Perdana Menteri pertama, Patrice Lumumba seorang muda yang berhaluan Marxist, mungkin dengan cita-cita untuk menasionalisir semua per-

tambangan, menghadapi negara bagian Katanga di bawah Moïse Tshombe yang mempergunakan pasukan-pasukan bayaran kulit putih. Tshombe menentang nasionalisasi pertambangan, akan tetapi ingin mengadakan diversifikasi dalam investment modal agar monopoli Belgia dapat dipecahkan dan diberi kesempatan untuk modal dari Eropa Barat. Tshombe tidak begitu tertarik untuk mengundang modal Amerika Serikat, karena takut bahwa raksasa Amerika akan mendesak modal-modal Eropa lain. Dengan digantikan Tshombe oleh Mobutu, maka Mobutu telah membuka Zaire untuk investment Amerika Serikat dan Jerman Barat. Jepang juga sudah mengadakan eksplorasi untuk investment.

Waktu pecah perang saudara di Nigeria, bekas jajahan Inggris, maka pemerintah pusat mendapat bantuan dari Inggris, Mesir dan Uni Soviet. Sebaliknya Biafra mendapat sokongan dari Perancis. Jangan dilupakan bahwa daerah Biafra, wilayah suku Ibo, adalah daerah minyak.

Persaingan sengit antara Perancis dan Inggris di benua Afrika, baik dalam masa penjajahan maupun dalam alam Afrika Merdeka, ternyata berlaku terus. Misalnya di Afrika Barat, dua negara kecil, Ghana dan Pantai Gading dengan sumber alam terbatas, dua-duanya membuat Bendungan hydro-electric dengan kapasitas yang jauh melebihi keperluan domestik. Dua-duanya negara tetangga juga memproduksi ban mobil yang juga belum tentu akan mendapat pasaran.

Riwayat negara-negara Afrika Bagian Selatan Sahara yang mempunyai mineral atau bahan pertambangan strategis seperti minyak bumi, memperlihatkan gejolak-gejolak masyarakat, baik dalam bentuk perang saudara seperti di Zaire dan di Nigeria, ataupun ketegangan-ketegangan seperti di Guinea, Sierra Leone dan di Zambia. Semuanya mempunyai pola yang sama, yaitu bahwa gejolak-gejolak terjadi bila pola ekonomi bertendensi akan pindah tangan dari modal asing yang sedang berkuasa kepada modal asing baru yang ingin berkuasa juga.

Investment dalam pertanian dan perkebunan, ternyata tidak membawa kegoncangan-kegoncangan masyarakat, seperti halnya dengan investment dari Nederland, Skandinavia, Italia dan lain-lain, yang dilakukan di Ethiopia, Afrika Timur, Afrika Barat dan juga di Afrika Selatan.

### 3. Investasi Komunis

Di zaman penjajahan para pemimpin Afrika lebih terpengaruh oleh partai2 sosialis di Inggris dan di Perancis daripada ajaran-



ajaran dari Moskow. Bahkan cara hidup kebanyakan pemimpin-pemimpin Afrika tetap meniru way of life Inggris dan Perancis, seperti juga halnya di daerah Belgia dan Portugal.

Sangat menarik perhatian bahwa di negara-negara Afrika bagian Selatan Sahara tidak terdapat Partai Komunis lokal, terkecuali di Sudan yang memang merupakan negara Afro-Arab. Di antara pemimpin-pemimpin Afrika yang terpengaruh oleh Marxisme adalah Patrice Lumumba dari Zaire, Sekou Toure dari Guinea dan Nkrumah dari Ghana. Sejarah menunjukkan bahwa realitas masyarakat Afrika dengan penduduk yang hidup dalam subsistensi tidak sesuai untuk mempraktikkan Marxisme dalam bentuk apapun juga. Walaupun di beberapa negara ada serikat-serikat buruh seperti di Guinea, Zaire, Zambia dan Tanzania, namun peranan serikat buruh tidak berarti dalam mengorganisir penduduk-penduduk yang tidak mengenal produksi, terkecuali produksi subsistensi dalam menggarap tanah gersang untuk keperluan sendiri. Struktur masyarakat Afrika merdeka tidak banyak berbeda dengan struktur masyarakat di waktu penjajahan.

Investment komunis, terutama dari Uni Soviet dan Eropa Timur tidak berarti. Berbeda dengan investment di Mesir dan Sudan, maka di negara-negara Afrika bagian Selatan Sahara lainnya, misalnya di bidang perdagangan, di daerah Afrika Timur, Blok Timur hanya mencapai  $1\frac{1}{2}\%$  dari perdagangan negara-negara Afrika. Partner dagang utama masih tetap Inggris dengan 40% lebih.

Lain halnya dengan RRC, Korea Utara dan Viet-Cong. Bantuan RRC sejak tahun 1970 mengalir ke Tanzania dan Zambia untuk pembuatan jalan kereta api; ke Zaire, Ethiopia. Rencana raksasa RRC, di samping pembuatan Tanzam Railway di Afrika Timur adalah pembangunan pelabuhan raksasa di Mauretania di bagian Barat Afrika. Perdagangan antara Afrika Timur dengan RRC pada tahun 1972 sudah mencapai 23% dari perdagangan seluruhnya.

Dalam bidang ideologi, ketiga negara Komunis Asia menitikberatkan perhatian pada pembinaan gerakan kemerdekaan seperti Frelimo untuk Mozambik. Operasi-operasi militer diikuti dengan pembangunan desa-desa lengkap dengan sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit dan usaha-usaha sosial lain yang diperlukan. Dapat diperkirakan bahwa rakyat yang tadinya tidak diperhatikan oleh pemerintah-pemerintah kolonial dengan pembebasan mereka diperhatikan dan karenanya berpartisipasi. Hal ini telah disaksikan oleh rombongan wartawan asing yang mengunjungi daerah-daerah bebas di Mozambik pada permulaan tahun 1973.



#### 4. Kemerdekaan untuk daerah-daerah Portugal di Afrika

Seperti juga terjadi di negara-negara lain di Afrika, transisi dari pemerintah jajahan putih ke tangan pemerintah berkulit hitam membawa akibat bahwa penduduk-penduduk kulit putih ber-exodus ke luar. Sejak bulan April 1974, ribuan orang-orang Portugal sudah ke luar dari Mozambik dan Angola. Ada yang kembali ke Portugal, ada yang pergi ke Afrika Selatan atau ke Rhodesia. Memang hal ini merupakan akibat dari kondisi mental kulit putih yang takut akan dominasi orang hitam. Exodus ini bagi Portugal merupakan beban yang berat menampung ribuan warga negara dalam kondisi ekonomi Portugal yang mandeg.

Lain daripada itu, akan timbul persoalan mengenai ekonomi Mozambik dan Angola, yang sedianya merupakan bagian dari ekonomi Dentong Putih, dan bersatu dengan Afrika Selatan akan menjadi raksa-sa. Di Mozambik sedang dibangun Bendungan Cabora Bassa untuk keperluan Mozambik, Rhodesia dan Afrika Selatan. Bendungan ini sedang dibangun dengan modal Portugal, Jerman Barat dan Afrika Selatan. Sebagian besar devisa Mozambik dihasilkan karena pengangkutan barang-barang ekspor Rhodesia ke pelabuhan-pelabuhan Beira dan Lorenzo Marques di Mozambik. Apakah pemerintah Frelimo akan melanjutkan pola ekonomi tadi? Bila Frelimo merubah pola ekonomi, maka akan timbul kemiskinan dan kemelaratan yang pasti menimbulkan kegoncangan masyarakat. Bila sebaliknya Frelimo melanjutkan pola ekonomi kerjasana dengan Rhodesia dan Afrika Selatan, maka akan timbul keretakan dalam pimpinan Frelimo, yang dengan sendirinya akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan masyarakat juga.

Kondaan di Angola lebih gawat lagi, karena gerakan-gerakan kemerdekaan tidak dapat bersatu. Selanjutnya, di samping memproduksi kopi, Angola memiliki mineral dan minyak bumi yang sedang dikerjakan dengan modal Portugal, Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Sampai sekarang Angola belum memasuki tahap transisi seperti di Mozambik. Bahkan, sementara di Mozambik pasukan-pasukan Frelimo telah memasuki kota-kota dengan ada insiden-insiden, di Angola penguasa-penguasa putih telah mengambil sikap koras yang telah mengakibatkan ribuan orang Afrika berduyun-duyun meninggalkan kota untuk mencari perlindungan di daerah-daerah.

Rupanya, Jendral Spínola memang menulis bahwa perang di Afrika tidak akan dapat diselesaikan dengan operasi militer, akan tetapi cita-cita Jendral Spínola masih mencakup susunan Portugal Raya dengan daerah Portugal Eropa dan daerah-daerah seberang lautan bersama-sama membentuk satu Community Lusitania.



Kenyataan menunjukkan bahwa proses dekolonisasi Portugal menurut rencana Spínola sudah ketinggalan disebabkan dengan adanya ketegangan-ketegangan dalam Junta militer Portugal, adanya pressure group kiri dan karena ketidak-ketentuan mengenai perkembangan di Mozambik dan Angola.

##### 5. Afrika Selatan - Realitas yang bertahan

Salah satu faktor pengikat bagi semua negara-negara Afrika Dagian Selatan Sahara adalah tekad Afrika melawan rasialisme dan apartheid yang tetap berlaku di Afrika Selatan dan di Rhodesia. Walaupun sejak 1961 Afrika Selatan tidak menjadi anggota Commonwealth Inggris dan pada tahun 1963 PBB menentukan boikot terhadapnya, Afrika Selatan dapat bertahan, bahkan tetap berkembang dalam bidang ekonomi dan lebih memperketat peraturan-peraturan untuk melaksanakan apartheid terhadap penduduknya.

Perdana Menteri Vorster dalam rangka menanggapi dekolonisasi untuk Mozambik dan Angola menerangkan bahwa apartheid di negaranya akan tetap dilaksanakan. Bangsa putih dan bangsa hitam di Afrika Selatan akan menempuh "separate development", yang akan membawa kemajuan bagi Afrika Selatan. Ia percaya bahwa di kemudian hari, negara-negara Afrika Selatan akan mengakui realitas Afrika Selatan agar dapat hidup bersama di benua Afrika.

Dalam Sidang Umum PBB oleh negara-negara Afrika diajukan resolusi agar Afrika Selatan dikeluarkan dari PBB. Sesuai dengan tata tertib persoalan tadi diajukan kepada Dewan Keamanan PBB. Walaupun mayoritas Dewan Keamanan menyetujui resolusi pengeluaran Afrika Selatan, namun veto dari Amerika Serikat, Inggris dan Perancis menghalangi hasil bahwa Afrika Selatan tetap menjadi anggota PBB. Keputusan Dewan Keamanan PBB itu berarti bahwa Afrika Selatan dengan direstui oleh Amerika Serikat, Inggris dan Perancis tetap merupakan realitas di benua Afrika. Selama Afrika Selatan melaksanakan politik apartheid dan rasialisme, selama itu negara-negara Afrika Dagian Selatan Sahara akan mempunyai ikatan bersama. Perlu diperhatikan bahwa persatuan negara-negara Afrika Dagian Selatan Sahara tidak didasarkan atas kekuatan-kekuatan ekonomi atau kesatuan strategi, melainkan didasarkan motivasi politik yang berdasarkan cita-cita anti-apartheid dan rasialisme.

Bahkan uraian di atas menggambarkan masih adanya instabilitas di bidang ekonomi, di dalam keamanan di negara masing-masing, dalam

perkembangan struktur pemerintahan menghadapi berbagai-bagai suku, dan adanya ketidak-ketentuan di Angola dan Mozambik. Semua faktor-faktor tadi menunjukkan bahwa Afrika akan bergolak terus.

## 6. Pengaruh pergolakan Afrika terhadap Indonesia

Dagi Indonesia peranan Afrika terasa di bidang politik, di forum-forum internasional, di mana Afrika sering ke luar dengan satu suara, yang terdiri dari lebih kurang 40 negara, baik negara-negara Arab, maupun negara hitam. Pengalaman Indonesia dalam hal Irian Barat cukup meyakinkan mengenai kohesi negara-negara Afrika.

Pergolakan sekarang yang mencakup dekolonisasi daerah-daerah Portugal di Afrika perlu diikuti dengan saksama, karena proses dekolonisasi Portugal mencakup juga Timor-Portugis. Politik pemerintah Indonesia terhadap keinginan rakyat Timor untuk bergabung dengan Indonesia akan dipejari terus-menerus oleh pemimpin-pemimpin Afrika.

Di samping lobbying di PBB oleh Perwakilan Tetap Indonesia, perlu kiranya diadakan penerangan melalui KBRI-KBRI di Afrika, untuk menggambarkan kenyataan bahwa penduduk Timor Portugis adalah sebagian bangsa Indonesia, sebagian dari suku yang berdiam di Timor Indonesia. Selanjutnya agar dapat digambarkan pola-pola pembangunan bagi daerah Timor seluruhnya sebagai bagian dari pembangunan seluruh Indonesia.

Alasan-alasan bahwa Timor Portugis tidak akan dapat independent sendiri, karena penduduk sedikit, resources kurang, mungkin tidak akan diterima di Afrika, di mana ada negara-negara yang lebih kecil, lebih sedikit penduduknya, lebih kurang resourcesnya. Salah satu dasar kokoh dari Organisasi Persatuan Afrika adalah bahwa semua negara anggota OAU diakui dalam bentuk seperti berlaku pada waktu kemerdekaan. Viability - daya hidup - negara-negara Afrika bagian Selatan Sahara tidak dipertanyakan, walaupun diakui bahwa di daerah Francophone misalnya, dua kesatuan administratif akan menjadi sejumlah negara-negara kecil. Motivasi politik Afrika Hitam, seperti digambarkan tadi, tidak selalu berdasarkan faktor-faktor ekonomis, hankam dan sebagainya, tetapi lebih didasarkan pada cita-cita anti-apartheid, anti-rasialisme dan anti-penjajahan.

Di samping peninjauan diplomatik di Lisbon, sokiranya peninjauan tentang perkembangan di Mozambik dapat bermanfaat bagi pengertian Indonesia terhadap pergolakan di Afrika.



## GUINEA BISSAU MERDEKA

Kirdi DIPOYUDO

### Pengantar

Kemerdekaan Guinea Bissau yang diumumkan Presiden De Spínola di Lisabon pada tanggal 10 September 1974 dalam rangka implementasi persetujuan yang ditandatangani oleh wakil Portugal dan wakil Partai Afrika untuk Kemerdekaan Guinea dan Cabo Verde (PAIGC) di Aljazair pada tanggal 26 Agustus 1974, di mana-mana umumnya disambut dengan gembira, khususnya oleh mereka yang ikut memperjuangkan seperti Komite Pembebasan Organisasi Persatuan Afrika, Komisi Dekolonisasi PBB, dan negara-negara anti kolonial, termasuk Indonesia. Tidak hanya karena berarti bahwa suatu negeri jajahan mendapatkan kemerdekaannya, tetapi juga karena hal itu akan mempercepat proses dekolonisasi baik koloni-koloni Portugis lainnya, termasuk Timor Lili, maupun negeri-negeri yang dikuasai minoritas kulit putih seperti Rhodesia dan Afrika Selatan. Dengan demikian kejadian itu mempunyai arti yang cukup penting, khususnya dalam sejarah perjuangan untuk mengakhiri kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Karangan ini bermaksud membahas latar belakang dan konsekwensi-konsekwensi kejadian itu. Secara berturut-turut akan dibicarakan tahap-tahap perjuangan kemerdekaan Guinea Bissau, pengaruhnya atas perkembangan politik negeri-negeri jajahan lainnya, masalah-masalah yang dihadapi negara baru itu dan prospek penyelesaiannya.

### I. Gambaran umum

Guinea Bissau, yang sebelum mencapai kemerdekaannya dikenal sebagai propinsi seberang lautan Portugis, adalah negara Afrika yang paling baru dan termasuk negara kecil dan terbelakang.

## 1. Lotak dan wilayahnya

Negara baru itu terletak di Afrika Barat antara Republik Guinea di sebelah Selatan dan Senegal di sebelah Utara. Seluruh wilayahnya, termasuk daerah pesisir rendah yang pada waktu pasang digenangi air laut, adalah seluas 36,125 km<sup>2</sup>, kurang dari sepertiga pulau Jawa. Kecuali sedikit dataran tinggi di perbatasan dengan Guinea, wilayah itu adalah tanah rendah. Daerah pesisir penuh dengan rawa mangrove dan hutan lebat, sedangkan daerah pedalaman adalah savanah<sup>1</sup>.

## 2. Penduduk

Pada tahun 1969 penduduknya berjumlah 550.000 orang. Pusat utamanya ialah ibukota Bissau, yang didiami sekitar 80.000 orang, termasuk mereka yang mengungsi dari daerah pertempuran selama perang kemerdekaan. Kini jumlah penduduk itu diperkirakan 600.000 orang, 60.000 orang di antaranya tinggal di negeri-negeri tetangganya, Guinea dan Senegal sebagai pengungsi.

Rakyat Guinea Bissau itu bukanlah suatu kesatuan homogen, tetapi terdiri atas berbagai kelompok. Penduduk pribumi terdiri dari sekitar 20 suku. Yang besar ialah suku Balante (30%), suku Fula atau Fulani (20%), suku Mandyako (15%), suku Malinke atau Mandingo (12,5%) dan suku Popel (7%). Karena iklim daerah pesisir yang kurang sehat, di masa lampau tidak banyak orang kulit putih menetap di negeri itu. Sampai akhir tahun 1920-an penduduknya bukan negro kurang dari 1.000 orang. Sejak permulaan kebanyakan pendatang adalah orang Indo dari kepulauan Cabo Verde. Sekitar tahun 1960 penduduk asing berjumlah sekitar 8.000 orang, sebagian besar pegawai negeri dan pedagang Portugis. Jumlah itu meningkat dengan kedatangan pasukan-pasukan Portugis yang pada tahun 1973 diperkirakan berjumlah 30.000 orang, termasuk 7.000 orang negro.

Dalam pergaulan sehari-hari digunakan sekitar 20 bahasa suku dan satu lingua franca, yaitu bahasa creole atau bahasa Portugis versi Cabo Verde, sebagai bahasa komunikasi antar suku. Akan tetapi baik pemerintah kolonial maupun kaum nasionalis berkampanye untuk menggunakan bahasa Portugis dalam pendidikan. Kenyataannya bahasa ini dijadikan bahasa resmi negara baru, paling tidak untuk sementara waktu.

---

<sup>1</sup>Cf. "Guinea Bissau", dalam Africa South of the Sahara 1973 (London, 1973), hal. 375.



Adanya banyak suku yang ke dalam menuntut loyalitas para warga dan ke luar kerap kali bersaing satu sama lain itu merupakan salah satu ciri struktur sosial Guinea Bissau. Selain itu sebagai akibat gerakan kemerdekaan terjadi semacam polarisasi antara suku yang loyal terhadap Pemerintah Portugis dan suku-suku yang memihak kaum nasionalis. Orang-orang Portugis menemukan sekutu-sekutu mereka yang paling tangguh di kalangan suku Fulani dan Malinke yang beragama Islam, sedangkan pejoang-pejoang PAIGC sebagian besar berasal dari suku Dalanto, golongan asimilado dan golongan Indo keturunan Cabo Verde<sup>1</sup>.

### 3. Perekonomian

Perekonomian Guinea Bissau masih terkebelakang. Sebagian terbesar rakyat hidup dari pertanian subsistensi dan belum banyak mengenal ekonomi uang. Beras merupakan bahan pangan pokok, yang di desa-desa dilengkapi dengan jagung, singkong, kacang tanah dan ubi manis. Produksi beras mencapai sekitar 170.000 ton setahun. Selama perang kemerdekaan Pemerintah Portugis dan PAIGC berlomba untuk memajukan pertanian, khususnya produksi beras, sebagai salah satu usaha untuk merebut hati rakyat.

Guinea Bissau mengeksport kacang tanah, yang ditanam di daerah pedalaman, dan kopra yang dihasilkan daerah pesisir dan pulau-pualu. Pada tahun 1968 ekspor kacang tanah adalah seharga 51 juta eskudos (sekitar 850 juta rupiah) dan ekspor kopra 25 juta eskudos (sekitar 400 juta rupiah). Sebaliknya Guinea Bissau mengimpor hampir seluruh keperluan akan barang industri, karena dalam negeri hampir belum ada industri.

Peternakan terdapat di kalangan suku Dalanto di pedalaman. Pada tahun 1967 terdaftar sekitar 230.000 ekor lembu, 143.000 ekor kambing, 93.000 ekor babi dan 53.000 ekor domba. Dagingnya adalah untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan sebagian kulitnya diekspor.

---

<sup>1</sup>Tentang penduduk Guinea Bissau lihat Irene S. van Dongen, "Physical, human and economic setting", dalam David M. Abshire dan Michael A. Samuels (Ed.), Portuguese Afrika. A Handbook (New York Washington - London, 1969), hal. 20; "Guinea Bissau", loc. cit. hal. 375-376.

Industrialisasi belum dimulai kecuali dalam bidang pengolahan pangan dan bangunan. Kenyataannya Guinea Bissau selama ini mempunyai suatu perekonomian perang yang dipaksakan atas perekonomian pertanian yang sebagian besar hasilnya dibagi dan dijual oleh suatu perusahaan dagang Portugis, Companhia Uniao Fabril, dan pedagang-pedagang setempat. Begitu jauh diketemukan bauxit, minyak dan mineral lain-lain, tetapi eksploitasinya dihambat oleh keadaan militer dan politik yang tidak menentu selama peperangan<sup>1</sup>.

#### 4. Fokus perjuangan kemerdekaan

Diarpun yang paling miskin dan tak berarti dari segi ekonomi di antara ketiga negeri jajahan Portugis di Afrika, Guinea Bissau telah menjadi fokus perjuangan untuk menumbangkan dominasi minoritas kulit putih di benua itu. Sedangkan gerakan-gerakan kemerdekaan di negeri-negeri lain lemah karena tidak hanya lemah organisasinya tetapi juga terpecah belah dan saling bermusuhan, PAIGC adalah satu-satunya partai yang aktif di Guinea Bissau dan memiliki suatu organisasi politik maupun militer yang baik, sehingga mudah diakui sebagai satu-satunya wakil rakyat negeri itu. Seperti akan kita lihat kemudian, Pemerintah Portugis mengadakan perundingan-perundingan dengan PAIGC dan akhirnya menyerahkan kekuasaan kepadanya<sup>2</sup>.

## II. Perjuangan kemerdekaan

Guinea Bissau mendapatkan kemerdekaannya lewat suatu perjuangan yang sengit. Portugal memandangnya sebagai bagian integral wilayahnya. Kepada penduduk diberikan kesempatan untuk mendapatkan persamaan hak dengan orang-orang Portugis sebagai asimilasi, biarpun de facto hanya sedikit orang pribumi memperoleh status itu karena persyaratannya berat. Pada tahun 1961 kepada semua penduduk diberikan hak untuk menjadi warga negara Portugis. Setiap orang yang mendaftarkan diri di kantor catatan sipil memperoleh hak kewarganegaraan dan jika memenuhi persyaratannya juga hak suara.

<sup>1</sup>Cf. "Guinea Bissau", loc. cit., hal. 376.

<sup>2</sup>Cf. Partido Africano por a Independencia do Guine e Cabo Verde (PAIGC) (Jerusalem, 1973), hal. 7.



Sesuai dengan gagasan itu Portugal menganggap sepi aspirasi kemerdekaan rakyat dan berusaha menumpas gerakan-gerakan kemerdekaan. Dengan demikian berkobarlah suatu peperangan yang bertahun-tahun lamanya dan berakhir dengan kemerdekaan negeri.

### 1. Gerakan kemerdekaan

Diarpun Guinea Bissau pada tahun 1951 mendapat status provinsi soberang lautan Portugis dan kepada penduduknya diberi kesempatan untuk memperoleh persamaan hak dengan orang-orang Portugis, timbullah di kalangan kaum terdidik suatu kesadaran nasional yang dengan cepat berkembang menjadi suatu gerakan kemerdekaan yang makin lama makin kuat dan makin meluas di kalangan rakyat. Mereka membentuk kelompok-kelompok rahasia kecil untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri mereka dan secara demikian lahirlah beberapa partai politik.

Pada tahun 1956 beberapa orang pemimpin rakyat mendirikan Partai Afrika untuk Kemerdekaan Guinea dan Cabo Verde (PAIGC) sebagai suatu organisasi di bawah tanah untuk menggerakkan tukang-tukang dan buruh-buruh di kota-kota agar melancarkan demonstrasi-demonstrasi untuk menuntut hak penentuan diri dan kemerdekaan. Ketika polisi Portugis pada tahun 1959 menindak dengan kejam penogokan buruh-buruh dok di Pigiguiti, PAIGC merubah strategi perjuangannya dan mulai suatu kampanye untuk mengembangkan kesadaran penduduk pedesaan. Kampanye itu mencapai suatu sukses yang gemilang berkat kepribadian dan perjuangan Sokjen partai Amilcar Cabral, yang mendirikan PAIGC bersama-sama dengan Raphael Barbosa. Karena kegiatannya di bidang pertanian, dia lebih terlibat dalam kehidupan penduduk pedesaan dan menyadari bahwa daerah pedalaman adalah penting bagi setiap program bagi Afrika.

Politik PAIGC memperjuangkan penggabungan Guinea Bissau dan Cabo Verde menjadi satu negara merdeka. Dari segi ekonomi dan strategi Guinea Bissau tidak banyak berarti, tetapi Cabo Verde mempunyai nilai strategi yang besar. Akan tetapi karena kecilnya wilayah, ruang gerak di Cabo Verde sangat terbatas, sehingga kaum nasionalis kepulauan itu tertarik pada PAIGC karena melihat Guinea Bissau sebagai batu loncatan bagi kemerdekaan negeri mereka. Dengan demikian kebanyakan pemimpin PAIGC adalah orang-orang Indo keturunan Cabo Verde, biarpun terdapat pula orang-orang dari daerah-daerah lain.

Solaras dengan strategi Cabral, PAIGC bergerak di tiga front, yaitu dalam negeri, dengan tetangga dan front internasional. Dalam negeri partai berusaha menanamkan kesadaran politik pada rakyat, kemudian melancarkan perang gerilya dan suatu peperangan yang lebih luas, dan akhirnya melaksanakan rencana-rencana pembangunan pedesaan. Selain itu partai berusaha mendapatkan dukungan dan bantuan negeri-negeri tetangga, Guinea dan Senegal, yang diperlukan untuk meneruskan pemberontakan. Dengan maksud itu partai memerlukan tempat-tempat latihan, gudang senjata dan persediaan pangan. Khususnya partai berusaha agar diterima oleh Senegal, yang mula-mula lebih senang dengan salah satu partai saingannya, Front untuk Pembebasan dan Kemerdekaan Guinea Portugis (FLING).

Front internasional tidak kurang pentingnya. Dana-dana yang berarti, supply senjata dan tekanan atas Portugal yang terus menerus hanya dapat diperoleh di kalangan internasional. Organisasi Persatuan Afrika setelah berkembang akan dapat menjadi sumber dukungan moral dan bantuan materiil. Senjata dan latihan militer diperlukan dan mudah didapat dari Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur.

Dalam usahanya untuk mendapatkan dukungan penduduk pedesaan, PAIGC menarik keuntungan dari keadaan pedesaan yang sampai saat itu diabaikan. Jalan-jalan hanya sedikit dan buruk sementara administrasi belum dikembangkan sewajarnya. Sambil menunggu masaknya kondisi dalam negeri dan kesempatan baik untuk melancarkan suatu ofensif terbuka, PAIGC perlahan-lahan menyusun suatu mekanisme partai sampai di desa-desa.

Partai merubah taktiknya dan pada tahun 1962 mulai melancarkan aksi-aksi sabotase yang kemudian disusul perang gerilya. Sukses yang dicapai pada permulaan memberi hati kepada pimpinan partai dan pada tahun 1964 dibentuknya suatu komando militer untuk seluruh negeri. Diarpun usaha pokok partai adalah dalam bidang militer, kegiatan-kegiatan sosial dan administratif juga memegang peranan penting. Sukses militer segera disusul dengan pembangunan sekolah-sekolah, balai pengobatan, prasarana ekonomi dan lain sebagainya.

Setelah PAIGC berhasil mengembangkan suatu organisasi partai yang berarti, Amilcar Cabral menghidupkan kembali hubungan-hubungannya dengan kaum nasionalis di negeri-negeri jajahan Portugis lainnya yang kebanyakan dikonalnya ketika belajar di Portugal dan bekerja di Guinea Bissau. Usaha itu dipermudah setelah Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola (MPLA) pada tahun 1959 membuka kantor perwakilan di Konakry.



Gerakan nasionalis lain yang merupakan saingan utama PAIGC ialah Front Pembebasan dan Kemerdekaan Guinea Portugis (FLING) yang lahir pada tahun 1953 sebagai gabungan lemah dari beberapa kelompok kecil, yaitu Gerakan Pembebasan Guinea (MLG), Persatuan Rakyat Guinea (UPG), Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Guinea (UPLG), Perhimpunan Demokrasi Afrika Guinea (RDAG) dan Persatuan Rakyat Pribumi Guinea Portugis (UNGP). Yang terakhir ini baru bergabung dengan FLING pada tahun 1963 dan menginginkan kemerdekaan tanpa revolusi dengan kekerasan.

Persaingan antara PAIGC dan FLING itu berlangsung di arena internasional sampai tahun 1967, akan tetapi PAIGC selalu lebih aktif daripada FLING. Organisasi Persatuan Afrika mula-mula berusaha untuk menyatukan kedua partai itu, tetapi pada tahun 1964 memutuskan untuk membantu partai yang aktif dalam pemberontakan. Demikianpun Pemerintah Senegal, yang kemudian lebih bekerjasama dengan PAIGC daripada dengan FLING yang mula-mula didukungnya.

Pada tahun-tahun 1965-1968 PAIGC meneruskan kampanyenya lewat siaran radio, di dalam negeri untuk membina kesadaran politik rakyat dan di luar negeri untuk mendapatkan pengakuan dan bantuan. Amilcar Cabral sendiri menjadi terkenal sebagai pejoang revolusioner Afrika yang paling berhasil.

Berbeda dengan gerakan-gerakan kemerdekaan lain, PAIGC mengutamakan organisasi politiknya tanpa mengabaikan organisasi militernya, yang dipecah menjadi tiga, yaitu satuan-satuan gerilya, militia dan tentara rakyat. Sementara pemimpin militernya mendapat latihan militer di RRC.

Pada tahun 1967 muncullah partai ketiga, Blok Demokrasi Guinea Bissau (DDG), yang mengatakan mewakili pegawai-pegawai negeri dan lain-lain dan menawarkan kesediaannya untuk membentuk suatu pemerintah koalisi dalam pengasingan dengan kedua partai lainnya. Akan tetapi seperti FLING, partai ini tidak ikut secara aktif dalam perang gerilya, sehingga PAIGC tampil kemuka sebagai satu-satunya partai nasionalis yang mendapat pengakuan dan dukungan internasional<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Tentang gerakan kemerdekaan di Guinea Bissau lihat Michael A. Samuel, "The nationalist parties", di David M. Abshire dan Michael A. Samuels (Ed.), op. cit. hal. 398-401.

## 2. Perang gerilya

Oleh sebab pemerintah kolonial Portugis menentang gerakan kemerdekaan dan melarang partai-partai politik kecuali partai pemerintah Uni Nasional yang kemudian dirubah namanya menjadi Aksi Nasional Rakyat, pemimpin-pemimpin nasionalis yang tidak dimasukkan penjara sebagai tahanan politik bergerak di bawah tanah atau lari ke luar negeri untuk menyusun kekuatan dan pada saatnya melancarkan perang kemerdekaan dari wilayah negara-negara tetangga yaitu Sonegal dan Guinea.

Setelah mengalami kegagalan sebagai suatu organisasi di kota-kota, PAIGC menempuh dua jalan untuk mencapai tujuannya. Di satu pihak mulai latihan politik dan militer di negeri tetangga, Guinea, dan di lain pihak berusaha memperluas kekuatan politiknya secara rahasia dengan membentuk sel-sel di daerah pedesaan Guinea Bissau itu sendiri. Bulan Juli 1961 partai masih sibuk dengan konsolidasi organisasinya ketika salah satu partai saingannya, melancarkan suatu serangan atas kota-kota perbatasan dengan Sonegal. Akan tetapi serangan itu tidak diulangi dan sejak itu PAIGC adalah satu-satunya partai yang aktif melawan pemerintah kolonial Portugis.

Pada pertengahan tahun 1962 PAIGC merasa bahwa persiapannya telah memadai dan memulai perang gerilya. Satuan-satuannya beroperasi dari wilayah Guinea dan melakukan sabotase terhadap fasilitas-fasilitas perhubungan. Selain itu juga melancarkan serangan-serangan di daerah-daerah di mana kekuatan Portugis adalah lemah. Pada tahun 1963 mereka memperbanyak serangan atas fasilitas-fasilitas tentara Portugis dan kadang-kadang juga menyerang kota-kota.

PAIGC menggunakan dua cara untuk mengobarkan pemberontakan. Kelompok-kelompok kecil melintasi perbatasan dari jurusan Selatan dan mengumpulkan penduduk di hutan-hutan dan menekan mereka, kadang-kadang dengan ancaman-ancaman, agar bergabung dengan mereka dan bertempur melawan pasukan-pasukan Portugis. Selain itu mereka membentuk organisasi partai di tingkat desa.

Ketika PAIGC memulai perang gerilya, pemerintah kolonial hanya mempunyai dua kompani di propinsi itu dan tidak mempunyai pasukan-pasukan secukupnya untuk mempertahankan pusat-pusat yang penting. Derbulan-bulan para pemberontak menguasai wilayah yang luas yang membujur dari ibukota Bissau ke jurusan Selatan dan



Tirur ke arah perbatasan dengan Guinea. Untuk menghindari pertempuran-pertempuran, beribu-ribu orang mengungsi ke negeri tetangga itu.

Untuk menghadapi pemberontakan itu pemerintah kolonial segera mendatangkan pasukan-pasukan baru dari Portugal dan mengangkat Jendral Arnaldo Schultz, yang berhasil menumpas pemberontakan di Angola, sebagai gubernur jendral dan panglima tertinggi. Sebagai akibatnya, untuk sementara waktu kaum gerilyawan mengalami kemunduran. Tempat-tempat administrasi dan tangsi-tangsi diduduki kembali dan penduduk yang mengungsi diberi hati untuk kembali ke desa-desa mereka dan membangunnya kembali dengan bantuan Portugis. Pada tahun 1965 keadaan militer menjadi mantab. Para pemberontak memiliki inisiatif militer yang kuat dan terus beroperasi dengan kebebasan, tetapi pusat-pusat penduduk dikuasai pasukan Portugis yang juga mampu memasuki semua daerah kecuali pulau Kono, benteng pemberontak di daerah rawa-rawa di sebelah Selatan Bissau.

Di distrik tengah, di sebelah Timur Bissau, kelompok-kelompok kecil gerilyawan beroperasi dari tempat-tempat persembunyian di hutan-hutan dan mengambil taktik meranjau jalan-jalan dan menjebak pasukan-pasukan Portugis. Apabila ada informasi yang pasti, orang-orang Portugis melakukan pengejaran, tetapi jarang terjadi kontak senjata, biarpun kadang-kadang mereka menemukan penintun senjata. Operasi-operasi militer Portugis sangat dihambat oleh sukarnya lalu lintas, biarpun pada tahun-tahun belakangan ini banyak dibangun jalan dan lapangan-lapangan terbang di daerah-daerah.

Dalam rangka menumpas pemberontakan itu, pemerintah kolonial Portugis memberikan 10.000 pucuk senapan kepada kepala-kepala suku Fula dan beberapa suku lainnya yang tetap loyal kepada Portugal, tidak hanya untuk mendapatkan bantuan, tetapi juga untuk menolak klaim para gerilyawan bahwa mereka mendapatkan dukungan seluruh penduduk. Selain itu pemerintah kolonial merekrutir sukarelawan-sukarelawan Afrika untuk membela desa-desa mereka dan membentuk suatu militia lokal sebagai pasukan-pasukan bantuan.

Tindakan orang-orang Portugis lain ialah membangun benteng-benteng di tempat-tempat kunci sepanjang perbatasan Tenggara untuk menutup jalan-jalan infiltrasi para pemberontak dari wilayah Guinea, akan tetapi mereka tidak berhasil menghentikan infiltrasi itu, karena para gerilyawan selalu menemukan jalan lain lewat hutan-hutan. Alasan lain bagi orang-orang Portugis untuk menempatkan pasukan-pasukan dekat perbatasan itu ialah melindungi penduduk dan memberi hati kepada mereka agar kembali dari pengungsian.

Dengan maksud itu pula mereka menyajikan fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan dan bahan-bahan pokok, dan membantu rakyat bercocok tanam dan membangun rumah-rumah baru. Sasaran utama kampanye pasifikasi itu ialah merebut hati rakyat.

Di bawah pimpinan Jendral Schultz tersebut, orang-orang Portugis di banyak tempat mendirikan desa setengah benteng atau desa yang diporkuat<sup>1</sup>. Biasanya pasukan-pasukan Portugis memasuki desa kosong dan mengamankan diri terhadap serangan dengan mendirikan pagar ganda kawat berduri di kelilingnya, yang dilengkapi sistem tanda bahaya. Kemudian mereka membangun suatu garis pertahanan dalam yang terdiri atas kubu-kubu dari kayu dan tanah, bunker-bunker dan tempat perlindungan di bawah tanah terhadap tembakan-tembakan mortir dan roket. Umumnya penduduk akan kembali secara berangsur-angsur sampai menjadi lengkap kembali. Sesudah itu orang-orang Portugis membangun suatu desa baru di luar perimeter pertahanan sebagai lambang hidupnya kembali kepercayaan atas tertib dan hukum. Desa itu biasanya dibangun secara permanen dan dilengkapi suatu mesjid, sekolah dan balai pengobatan, dan memiliki suatu pasukan sukarelawan Afrika di bawah pimpinan kepala desa. Tidak semua desa serupa itu mempunyai garnisun Portugis, tetapi selalu dapat berhubungan lewat radio dengan suatu garnisun yang mengirimkan bantuan jika ada bahaya. Desa-desa itu kerap kali mampu menangkis serangan gerilyawan tanpa bantuan.

Selain memberikan keamanan, kehadiran pasukan-pasukan Portugis juga membawa banyak keuntungan ke pedalaman seperti fasilitas-fasilitas perhubungan dan pengangkutan, perumahan dan dinas-dinas yang lebih baik. Seperti di Angola, juga di Guinea Bissau lebih banyak kemajuan dicapai sesudah pecahnya peperangan daripada sebelumnya.

Sistem pertahanan Portugis itu ternyata efektif dan merupakan jawaban Portugis atas klaim para gerilyawan bahwa mereka menguasai sepertiga sampai dua pertiga wilayah Guinea Bissau. Hal itu telah mendorong PAIGC pada tahun 1965 untuk mengumumkan suatu program pembangunan di daerah-daerah yang dikuasainya. Pelaksanaan program itu menunjukkan kemampuan organisasi para gerilyawan dan keberhasilan mereka untuk mendapatkan dukungan rakyat di daerah-daerah itu.

Pada tahun 1966 kemajuan PAIGC terus menanjak dan kekuatan militer kedua pihak meningkat. Jumlah gerilyawan meningkat dari beberapa ratus orang pada tahun 1962 menjadi 3.000 orang pada tahun 1964, 6.000 orang pada tahun 1966 dan sekitar 107.000 orang



menjelang akhir perang gerilya. Sejalan dengan perbaikan dalam organisasi, persenjataan, perlengkapan, taktik dan disiplin, mutu mereka meningkat pula. Dalam periode yang sama kekuatan Portugis meningkat menjadi 20.000 sampai 30.000 orang pasukan reguler dan 6 kompani militia setempat selain pasukan-pasukan sukarelawan sipil yang disusun sebagai kelompok-kelompok bela diri di desa-desa.

Pasukan-pasukan PAIGC mendapatkan latihan permulaan di pangkalan di Kindia Guinea, yang mula-mula mempunyai suatu staf instruktur Soviet, yang kemudian digantikan orang-orang Aljazair. Di pangkalan itu para gerilyawan yang menerima supply dan senjata, termasuk basoka, mortir, senapan mesin dan sebagainya yang berasal dari Eropa Timur dan Cina.

Pada tahun 1967 PAIGC mencapai suatu modus vivendi dengan pemerintah Senegal yang sebelumnya di pihak FLING, sehingga dapat menggunakan wilayahnya. Kebanyakan serangan dari Senegal dilancarkan lewat perbatasan Utara dan datang dari pangkalan di Kolda, yang lambat laun menggeser kedudukan pangkalan di Kindia sebagai pusat latihan dan supply PAIGC yang utama, biarpun markas besar Amilcar Cabral tetap di Konakry. Beberapa alasan rupanya telah mendorong PAIGC untuk melakukan pergeseran itu, yaitu kegagalan merebut hati suku-suku di Selatan, perbaikan sikap pemerintah Senegal, keadaan di Senegal yang lebih baik bagi para pengungsi, dan keadaan Guinea Bissau Utara yang lebih menjamin kehidupan.

Menjelang akhir tahun 1967 Amilcar Cabral mengatakan bahwa PAIGC menguasai separuh negeri dan beberapa peninjau Darat yang atas undangannya mengunjungi daerah-daerah yang telah dibebaskan itu membenarkan klaim tersebut. Mereka juga memperkuat laporan para gerilyawan bahwa mereka menguasai lebih dari separuh desa-desa dan daerah pedesaan, beroperasi di sebagian terbesar negeri dengan sukses dalam satuan-satuan gerilya, dan mulai mengepung kota-kota kecuali dua atau tiga yang paling besar. Akan tetapi pasukan-pasukan Portugis masih memiliki kemampuan untuk melancarkan ofensif pembalasan, terutama karena memiliki pesawat-pesawat tempur jet yang dalam waktu beberapa menit dapat mencapai semua bagian negeri. Kenyataannya, pada tahun 1974 Portugal masih bertahan di Guinea Bissau dan masih akan tetap bertahan kalau pemerintah baru tidak melepaskan politik kolonial pemerintah sebelumnya.

Apabila orang-orang Portugis masih bertahan di Guinea Bissau, hal itu bukan hanya berkat kekuatan militer mereka, melainkan juga karena kesediaan paling tidak sebagian penduduknya untuk bekerjasama dengan pemerintah Portugis. Loyalitas mereka itu merupakan

salah satu alasan yang diberikan orang-orang Portugis untuk bertahan dalam arti bahwa mereka merasa wajib melindungi penduduk yang loyal itu. Diarpun klaim kaum nasionalis bahwa mereka menguasai lebih dari separuh negeri adalah benar, hal itu tidak berarti bahwa mereka juga menguasai separuh penduduk karena sebagian besar penduduk tinggal di kota-kota atau desa-desa yang dijadikan setengah benteng tersebut di bawah perlindungan Portugis. Faktor lain dalam tekad Portugis itu ialah tradisi Portugal, kepentingan-kepentingan ekonomi Companhia Uniao Fabril, dan rasa takut akan konsekwensi-konsekwensinya bagi Angola dan Mozambique<sup>1</sup>.

### 3. Proklamasi kemerdekaan Guinea Bissau

Pada tahun 1971 Amilcar Cabral mengatakan telah menyusun suatu pemerintahan sipil di daerah-daerah yang telah dibebaskan yang mengurus sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, poliklinik-poliklinik, dinas-dinas sosial, pusat-pusat komersial dan pengadilan-pengadilan. Menjelang akhir 1972 PAIGC melaporkan telah mendaftar 58.000 orang pemilih dan melangsungkan pemilihan 15 dewan regional yang bersama-sama mempunyai 240 orang anggota. Dewan-dewan itu kemudian mengadakan suatu pertemuan dan memilih 72 orang yang akan duduk dalam Majelis Nasional Rakyat (Parlemen) bersama-sama dengan 5 orang wakil serikat-serikat buruh, 3 Orang wakil mahasiswa dan 40 orang yang ditunjuk. Pembentukan parlemen itu direncanakan sebagai satu langkah menuju proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada tahun 1973.

Pembunuhan Amilcar Cabral di Konakry pada bulan Januari 1972 tidak menghambat pelaksanaan rencana itu. Wakilnya Aristides Pereira ditunjuk sebagai Pejabat Sekjen partai dan kemudian dikukuhkan Kongres partai sebagai Sekjen.

Pada bulan Juli 1973 PAIGC melangsungkan kongresnya yang kedua - yang pertama diadakan pada tahun 1964 - di wilayah Guinea Bissau yang telah dibebaskan, yang dihadiri 138 orang wakil dan 60 orang peninjau. Kongres antara lain meninjau kembali Anggaran Dasar partai, sedikit merubah susunan partai, mengukuhkan Pereira sebagai Sekjen dan memilih Joao Vieira dan Francisco Mendes menjadi anggota Sekretariat Permanen di samping Aristides Pereira dan Luis Cabral. Kongres juga memutuskan, bahwa Majelis Nasional Rakyat akan mengadakan sidangnya yang pertama pada tahun itu juga dan memproklamasikan kemerdekaan Guinea Bissau.

<sup>1</sup>Cf. George Martelli, "Conflict in Portuguese Africa", dalam David M. Abshire dan Michael A. Samuels (Ed.), op. cit. hal. 415-420.



Sesuai dengan keputusan itu, pada tanggal 23-24 September 1973 Majelis Nasional Rakyat mengadakan sidangnya yang pertama di Nadina Doe, Guinea Bissau Selatan. Pada tanggal 24 September Sidang memproklamlirkan Republik Guinea Bissau, menyatakan Amilcar Cabral secara anumerta sebagai pendiri negara dan menetapkan bendera dan lagu kebangsaan. Selain itu Sidang memilih suatu Dewan Negara di bawah pimpinan Luis Cabral dan suatu Dewan Eksekutif 16 orang di bawah pimpinan Francisco Mendes, yang dalam kedudukannya itu berfungsi sebagai Perdana Menteri. Luis Cabral selanjutnya diangkat sebagai Presiden Guinea Bissau, dan sekali lagi Aristides Pereira dikukuhkan sebagai Sekjen Partai.

Dalam proklamasi kemerdekaan itu, PAIGC menekankan pentingnya meneruskan perang kemerdekaan bersama-sama dengan wilayah-wilayah jajahan Portugis lainnya dan menyatakan tekadnya untuk menyatukan kepulauan Cabo Verde dengan Guinea Bissau menjadi satu negara dan sehubungan dengan itu menyatakan bersedia mengadakan perundingan-perundingan dengan Pemerintah Portugis untuk mengakhiri peperangan dan mengadakan hubungan-hubungan baru atas dasar kemerdekaan dan persamaan<sup>1</sup>.

Proklamasi kemerdekaan Guinea Bissau itu disambut dengan gembira oleh negara-negara anti kolonial, khususnya mereka yang ikut memperjoangkannya. Satu demi satu negara-negara itu mengakui negara baru itu. Pengakuan PBB bulan Nopember berikutnya disusul pengakuan banyak negara lainnya. Akan tetapi Pemerintah Portugal tidak mau tahu menahu dan meneruskan perang kolonialnya. Namun sementara itu di kalangan angkatan bersenjata timbulah suatu keyakinan bahwa perang kolonial tidak akan mencapai sasarnya dan oleh sebab itu harus diakhiri segera mungkin dan disusul dengan suatu penyelesaian politik. Keyakinan itu meluas dan lambat laun menjadi suatu gerakan yang akhirnya berhasil menumbangkan rejim Caetano dan menggantinya dengan pemerintah baru di bawah pimpinan Jondral De Spincula, yang segera melepaskan politik kolonial dan memulai proses dekolonisasi.

42

#### 4. Penyelesaian politik

Dengan berhasilnya kudeta militer di Portugal tanggal 25 April 1974 perjuangan kemerdekaan Guinea Bissau memasuki suatu tahap baru. Oleh sebab kudeta tidak hanya dilancarkan untuk mengembalikan hak-hak sipil dan demokrasi di Portugal tetapi juga untuk

<sup>1</sup>Cf. Antara, 27 September 1973; Partido Africano por a Independencia do Guine e Cabo Verde, hal. 8-9.

mengakhiri perang kolonial yang tidak hanya gagal mencapai sasarannya tetapi juga merupakan suatu bencana bagi Portugal, pemerintah baru segera mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri perang kolonial dan mencari suatu penyelesaian politik bagi sengketa-nya dengan kaum nasionalis. Pemerintah menyatakan mengakui hak rakyat negeri-negeri jajahannya untuk menentukan nasibnya sendiri dan sesuai dengan itu mengusulkan suatu referendum. Pemerintah bersedia menerima konsekwensi-konsekwensinya, termasuk mengakui kemerdekaan apabila rakyat yang bersangkutan menghendakinya. Sehubungan dengan itu Pemerintah berseru kepada organisasi-organisasi gerilyawan agar meletakkan senjata dan mengakhiri peperangan, kembali ke negeri masing-masing dan menorkan perjuangan mereka sebagai partai politik. Pemerintah juga menawarkan perundingan-perundingan dengan mereka untuk mencari suatu penyelesaian damai<sup>1</sup>.

Pemimpin-pemimpin PAIGC menyambut pergantian pemerintah Portugis dan angin baru di Lisabon itu dengan gembira, tetapi menyatakan tidak puas dengan otonomi yang ditawarkan itu. Partai menuntut agar Portugal mengakui Kemerdekaan Republik Guinea Bissau yang telah diproklamkan dan diakui PBB dan banyak negara itu, dan menyatakan akan meneruskan perang gerilya sampai sasaran itu tercapai, akan tetapi bersedia untuk mengadakan perundingan-perundingan dengan Portugal<sup>2</sup>.

Pada tanggal 25 Mei 1974 dimulai perundingan-perundingan antara Portugal dan PAIGC sebagai wakil rakyat Guinea Bissau, yang belum memberikan hasil yang diharapkan karena posisi kedua pihak masih jauh satu sama lain. Delegasi Portugal menghendaki suatu penyelesaian berangsur-angsur, dimulai dengan gencatan senjata yang akan disusul dengan partisipasi PAIGC dalam kegiatan politik dan referendum untuk menentukan hari depan negeri. Sebaliknya PAIGC mengajukan beberapa syarat politik bagi gencatan senjata, pertama-tama pengakuan Republik Guinea Bissau dan penggabungan Cabo Verde dengan Guinea Bissau. Usul referendum ditolaknya dengan tegas. Meskipun pada perundingan-perundingan itu belum dicapai kesepakatan kata kecuali untuk meneruskannya setelah masing-masing meninjau kembali posisinya, dilangsungkannya perundingan-perundingan itu sendiri telah merupakan suatu kemajuan dan suatu kemenangan bagi PAIGC. Secara implisit partai diakui sebagai wakil rakyat Guinea Bissau yang sah. Lagi pula pihak yang satu dapat mengenal pihak yang lain dan argumen-argumen yang mendasari posisinya<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Berita AFP yang dikutip Indonesian Observer, 13 Mei 1974.

<sup>2</sup>Cf. Indonesian Observer, 15 Mei 1974.

<sup>3</sup>Cf. Antara, 29 Mei 1974.



Perundingan babak kedua dilangsungkan di Aljazair pada pertengahan bulan Juli. Posisi kedua pihak telah menjadi lebih lunak, tetapi masih terdapat suatu perbedaan tafsir arti penentuan diri (self determination) yang belum dapat diatasi. Bagi Portugal penentuan diri dapat berarti otonomi atau kemerdekaan sesuai dengan kemauan rakyat. Akan tetapi bagi PAIGC penentuan diri hanya berarti kemerdekaan penuh. Perundingan-perundingan berakhir tanpa mencapai hasil yang definitif. Kedua delegasi akan bertemu lagi setelah mengadakan pembicaraan dengan pemerintahnya<sup>1</sup>.

Sebelum perundingan-perundingan diteruskan, Pemerintah Portugis meninjau kembali sikapnya dan mengambil suatu posisi yang kiranya dapat diterima kaum nasionalis. Pada tanggal 27 Juli 1974 Presiden De Spínola mengumumkan keputusan pemerintah kepada rakyat Portugis. Portugal akan segera mulai proses menyerahkan kekuasaan di koloni-koloninya di Afrika. Suatu undang-undang konstitusional telah diundangkan sebagai dasar hukum yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk memberikan kemerdekaan kepada negeri-negeri jajahan yang berdasarkan konstitusi tahun 1933 adalah bagian integral negara. Telah tiba saatnya bagi Presiden Republik untuk mengukuhkan hak semua bangsa wilayah-wilayah seberang lautan Portugis atas penentuan diri, termasuk segera mengakui hak mereka atas kemerdekaan. Portugal terbuka bagi inisiatif mereka untuk memulai pekerjaan merencanakan, mengorganisir dan melaksanakan proses dekolonisasi, bersama-sama dengan penerimaan hak atas kemerdekaan politik, yang akan diumumkan dengan syarat dan pada saat yang akan disetujui<sup>2</sup>. Dua hari kemudian Presiden De Spínola mengumumkan bahwa Guinea Bissau akan mendapatkan kemerdekaan lebih dahulu dan sesudah itu Portugal akan mengalihkan perhatiannya atas Mozambique dan Angola<sup>3</sup>.

Menanggapi pernyataan De Spínola itu, pada tanggal 27 Juli 1974 Presiden Guinea Bissau Luis Cabral antara lain mengatakan bahwa pidato Presiden De Spínola itu menghapus rintangan-rintangan dan kesukaran-kesukarannya dan oleh sebab itu dapat dicapai sepat-kat kata. Akan tetapi ditambahkannya bahwa PAIGC tidak dapat menerima gagasan referendum di Guinea Bissau<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup>Cf. Antara, 20 Juni 1974.

<sup>2</sup>Berita UPI yang dimuat The Indonesia Times, 29 Juli 1974.

<sup>3</sup>Berita AP yang memuat The Indonesia Times, 30 Juli 1974.

<sup>4</sup>Berita AP yang dikutip The Indonesia Times, 30 Juli 1974.



Dengan demikian perundingan-perundingan babak ketiga yang dilaksanakan di Aljazair pada tanggal 23-26 Agustus 1974 dapat berjalan dengan lancar dan pada tanggal 26 Agustus menghasilkan suatu persetujuan perdamaian, yang menetapkan gencatan senjata, penarikan pasukan-pasukan Portugis sebelum tanggal 31 Oktober 1974, demobilisasi pasukan-pasukan Portugis yang berkebangsaan Afrika, perjanjian kemerdekaan Guinea Bissau dan penyerahan kekuasaan pada tanggal 10 September 1974, kerjasama atas dasar kemerdekaan, persamaan, saling menghormati dan saling menguntungkan, dan suatu referendum di Cabo Verde. Portugal juga menjanjikan akan menoruskan bantuannya untuk pembangunan Guinea Bissau<sup>1</sup>.

Sesuai dengan persetujuan itu pada tanggal 10 September 1974 Presiden De Spínola mengumumkan kemerdekaan Guinea Bissau dan menyerahkan kekuasaan kepada PAIGC<sup>2</sup>. Sebelumnya gencatan senjata telah dimulai. Demikianpun penarikan pasukan-pasukan Portugis dan demobilisasi pasukan-pasukan Afrika. Dengan demikian berakhirilah konflik antara Portugal dan kaum nasionalis Guinea Bissau lewat suatu penyelesaian politik yang menguntungkan kedua pihak dan menjamin adanya kerjasama.

Pengakuan kemerdekaan Guinea Bissau itu adalah hasil berbagai faktor. Perang gerilya yang dilancarkan PAIGC dan yang makin lama makin efisien sejalan dengan perbaikan organisasi, disiplin, latihan, logistik, taktik dan persenjataan, tekanan internasional yang semakin meningkat, dan keyakinan Pemerintah baru Portugal bahwa peperangan di Afrika tidak dapat diselesaikan secara militer dan oleh sebab itu harus diakhiri dan diselesaikan secara politik, semuanya itu telah mendorong Portugal untuk melepaskan politik kolonialnya dan memulai suatu proses dekolonisasi. Dengan perkataan lain, pengakuan kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan kaum nasionalis Guinea Bissau dan kekuatan-kekuatan anti kolonial di satu pihak dan hasil politik baru Portugal di lain pihak.

##### 5. Pengaruh kemerdekaan Guinea Bissau

Pengakuan kemerdekaan Guinea Bissau itu rupanya akan mempercepat proses dekolonisasi, khususnya negeri-negeri jajahan Portugis lainnya<sup>3</sup>. Kejadian itu menunjukkan bahwa Pemerintah Portugis adalah

---

<sup>1</sup>Berita Antara, 27 Agustus 1974.

<sup>2</sup>Cf. Antara, 11 September 1974; berita AFP yang dimuat Indonesian Observer, 13 September 1974.

<sup>3</sup>Cf. Pernyataan Duncan Cambell, wakil Australia di PBB, yang dikutip Kompas, 28 Agustus 1974.



sungguh-sungguh ketika menyatakan mengakui hak bangsa-bangsa jajahannya atas penentuan diri dan bersedia menerima konsekwensi-konsekwensinya, termasuk mengakui kemerdekaan apabila bangsa yang bersangkutan menghendakinya. Pemerintah Portugal telah melepaskan politik kolonialnya dan menginginkan hubungan-hubungan baru dengan negeri-negeri bekas jajahannya atas dasar kemerdekaan, persamaan, saling menghormati dan saling menguntungkan. Sebagai akibatnya sikap kaum nasionalis akan menjadi lebih lunak dan lebih luwes pula, sehingga perundingan-perundingan antara mereka dan Portugal akan memberikan hasil yang diharapkan.

De facto perundingan-perundingan antara Portugal dan FRELIMO sebagai wakil rakyat Mozambique berjalan dengan lancar dan pada tanggal 7 September 1974 ini menghasilkan suatu persetujuan kemerdekaan yang mengakhiri peperangan di negeri itu. Berdasarkan persetujuan itu gencatan senjata dimulai malam itu juga, kekuasaan diserahkan kepada suatu pemerintah sementara yang akan dipimpin seorang Perdana Menteri yang ditunjuk FRELIMO, suatu komisi militer gabungan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, dan seorang Komisaris Tinggi Portugis diangkat oleh Portugal. Pemerintah baru itu akan memegang kekuasaan sampai kemerdekaan Mozambique diresmikan pada tanggal 25 Juni 1975<sup>1</sup>.

Pengakuan kemerdekaan Guinea Bissau dan prospek kemerdekaan Angola dan Mozambique itu merupakan suatu pukulan berat bagi rejim minoritas kulit putih di Rhodesia dan Afrika Selatan, tidak hanya karena penarikan pasukan-pasukan Portugis akan mengisolir mereka dan membuyarkan strategi pertahanan kulit putih di Afrika bagian Selatan, tetapi juga karena kejadian itu akan memberikan hati kepada rakyat Negro di kedua negeri itu, khususnya kaum nasionalis, untuk meningkatkan perjuangan kemerdekaan mereka, termasuk serangan gerilya. Bagi mereka terbuka dua kemungkinan, yaitu meningkatkan kemampuan militer mereka untuk menghadapi peningkatan perang gerilya itu atau mengakui hak-hak rakyat Negro dan membentuk suatu majority rule.

Selama ini strategi pertahanan rejim-rejim kulit putih di Afrika bagian Selatan itu didasarkan atas doktrin bahwa sungai Sambesi harus dipertahankan sebagai garis pemisah antara Afrika negro dan Afrika kulit putih, dan bahwa aspirasi-aspirasi dan kekuasaan negro harus dibatasi di negeri-negeri di sebelah Utaranya. Dalam rangka itu rejim Rhodesia dan Afrika Selatan mengadakan kerjasama erat dalam bidang pertahanan dan ekonomi dengan pemerintah

<sup>1</sup>Cf. Antara, 10 September 1974.

kolonial Portugis. Dengan keputusan Portugal untuk memberikan kepada negeri-negeri jajahannya di Afrika itu strategi bersama itu buyar. Rhodesia dan Afrika Selatan kehilangan sekutu dan terpaksa menyesuaikan diri dengan kenyataan-kenyataan baru di kawasan itu.

Minoritas kulit putih di Rhodesia kini merasa terisolir dan terancam. Bahkan minoritas kulit putih di Afrika Selatan yang merupakan kubu pertahanan supremasi kulit putih di Afrika sudah tidak merasa aman terhadap kekuatan-kekuatan yang mengolilinginya. Kenyataannya, orang-orang di Pretoria mulai membicarakan kemungkinan meninggalkan Rhodesia dan memusatkan perhatian atas pertahanan wilayah mereka sendiri.

Rejim kulit putih di Rhodesia merasa akan dikopung oleh bangsa-bangsa negro yang merdeka dan menjadi korban isolasi politik dan ekonomi. FRELIMO telah mengancam akan memutuskan semua hubungan dengan rejim PM Smith, sehingga tinggal satu jalan kereta api sebagai penghubung dengan luar negeri. Rhodesia sedang membangun jalan kereta api lain ke Afrika Selatan tetapi jalan itu baru tahun depan akan selesai. Lagi pula Afrika Selatan tidak antusias dengan prospek itu, karena jaringan kereta apinya telah sangat sibuk untuk keperluannya sendiri.

Bahwa perang gerilya rupanya akan ditingkatkan juga menimbulkan kekhawatiran. Serangan-serangan gerilya telah merubah banyak rumah petani kulit putih di perbatasan Timur Laut menjadi benteng. Sebagai akibatnya banyak orang mulai meninggalkan negeri, khususnya orang-orang muda yang sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk dinas militer. Sementara itu arus imigrasi hampir berhenti sama sekali. Apabila Angola dan Mozambique menjadi pangkalan perang gerilya yang dilancarkan untuk menjatuhkan pemerintah PM Smith, emigrasi dari Rhodesia itu akan berkembang menjadi suatu eksodus. Untuk menghentikan pemberontakan rakyat negro itu, pemerintah menawarkan tambahan 6 kursi parlemen dan pengendoran perundang-undangan rasial, tetapi pemimpin-pemimpin negro sudah tidak bersedia menerimanya. Mereka menuntut majority rule.

Petunjuk lain bahwa supremasi kulit putih di Rhodesia hampir tamat riwayatnya ialah sikap Afrika Selatan. Setelah Portugal angkat kaki dari Afrika, Rhodesia sudah bukan perisai baginya. Sehubungan dengan itu semakin banyak pemimpin Afrika Selatan merasa tidak dapat menorkan bantuannya kepada Rhodesia, tidak hanya dalam bidang militer tetapi juga dalam bidang ekonomi dan politik.



PM Vorster bahkan telah memberitahukan kepada PM Smith bahwa dia harus menyadari bahwa pemerintahan mayoritas negro tidak dapat di-  
cegah<sup>1</sup>.

Mengenai hari depan negeri mereka sendiri pendapat mereka al-  
lah berbeda. Berbeda dengan koloni-koloni Eropah lainnya, yang  
tidak pernah mempunyai sejuta penduduk kulit putih, Afrika Selatan  
mempunyai sekitar 4 juta orang penduduk kulit putih. Mereka sama  
sekali tidak bermaksud memperlunak politik pemisahan rasial mereka,  
tetapi meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan militer mereka. De-  
ngan tegas mereka menolak anggapan bahwa mereka tidak berhak sepe-  
nuhnya untuk menguasai Afrika Selatan. De facto nenek moyang mereka  
telah berabad menetap di negeri itu. Mereka bahkan mengatakan de-  
ngan bangga telah dua kali melancarkan perang kemerdekaan melawan  
orang-orang Inggris yang menjajah mereka (perang Boer). Seperti  
dapat diperkirakan, sikap semacam itu mempercepat proses polarisasi  
dalam arti bahwa kekuatan moderat di kedua pihak makin berkurang  
dan kekuatan radikal makin kuat.

Jawaban minoritas kulit putih atas masalah rasial ialah pem-  
angunan bantustan-bantustan, yaitu negeri-negeri otonom bagi suku-  
suku negro masing-masing di wilayah negara. Setelah merdeka bangsa-  
bangsa negro itu akan hidup berdampingan dengan bangsa kulit putih  
atas dasar persamaan. Akan tetapi rakyat negro menolak pendapat  
itu dan mengemukakan, bahwa mereka hanya sebagian 13% wilayah  
Afrika Selatan padahal mereka jauh lebih banyak dari pada penduduk  
kulit putih, 4 lawan 1. Lagi pula sebagian besar wilayah itu ada-  
lah tanah kurus dan miskin, sedangkan minoritas kulit putih meng-  
ambil seluruh daerah yang berharga, termasuk tambang emas dan  
intan. Kelompok-kelompok etnis lainnya, yaitu sekitar 2 juta orang  
Indo (coloured) dan 620.000 orang Asia, dibiarkan mengambang di  
antara dua kelompok besar itu.

Biarpun mengatakan bahwa politik apartheid itu akan memocah-  
kan masalah rasial, pemimpin-pemimpin kulit putih lebih menganda-  
kan kekuatan militer mereka. Persenjataan Afrika Selatan meliputi  
pesawat-pesawat tempur dan pembom supersonik, sistim tanda bahaya  
hiper modern, tank-tank ringan, kendaraan berlapis baja, peluru-  
peluru kendali, helikopter-helikopter, pesawat-pesawat pengangkut,  
dan suatu angkatan laut yang kecil tetapi efisien. Baru-baru ini  
pemerintah mengumumkan bahwa anggaran belanja untuk pertahanan di-  
tingkatkan 50%. Embargo senjata yang disorukan PBB tidak berhasil

---

<sup>1</sup>John Borrel, "Will Vorster dump Smith?", OFNS yang dimuat pada  
The New Standard, 19 Oktober 1974, p. 10.

menghentikan supply senjata dan minyak. Sebagai imbalan bagi uranium Perancis melengkapinya dengan segala macam senjata. Biarpun negara-negara Arab menghentikan supply minyak kepadanya, Iran meneruskan supplynya.

Dengan demikian boikot itu tidak mengurangi kekayaan dan kekuatan Afrika Selatan. Kedudukannya sekarang ini adalah sangat kuat. Akan tetapi mengingat bahwa Afrika negro bergerak ke jurusan Selatan dengan cepat dan dengan tokad yang bulat, sementara orang mulai meragukan kemampuan Afrika Selatan untuk membendung arus sejarah selama-lamanya. Kalau Rhodesia jatuh, kalau perang gerilya ditingkatkan secara drastis dengan bantuan negara-negara Afrika dan OAU, dan kalau rakyat negro meningkatkan perlawanannya, Afrika negro mungkin dapat menundukkan benteng perlawanan kulit putih itu. Kekuatan dapat membeli waktu, tetapi rejim minoritas kulit putih Afrika Selatan akhirnya akan terpaksa melepaskan politik apartheid-nya dan membentuk majority rule atau bertempur sampai hancur<sup>1</sup>.

### III. Republik Guinea Bissau

Republik Guinea Bissau mempunyai lembaga-lembaga negara sebagai berikut. Seorang Presiden sebagai Kepala Negara, suatu pemerintahan di bawah pimpinan seorang Perdana Menteri, suatu Majelis Nasional Rakyat sebagai parlemen dan suatu lembaga kehakiman. Akan tetapi sesuai dengan pola komunis yang dianutnya, kekuasaan sebenarnya adalah pada PAIGC, khususnya Kongres partai, yang memilih anggota-anggota Komite Sentral yang pada gilirannya memilih anggota-anggota Komite Eksekutif yang berfungsi sebagai biro politik.

#### Susunan PAIGC

Sesuai dengan pola komunis, dasar struktur sipil maupun militer PAIGC adalah Komite Sentral yang berfungsi sebagai dewan tertinggi. Pimpinannya dipusatkan pada Sekretariat Permanen, yang terdiri atas 4 orang, yaitu seorang Sekjen, seorang Wakil Sekjen dan dua orang anggota. Sekarang ini Sekjen partai ialah Aristides Pereira, Wakil Sekjen Luis Cabral yang merangkap sebagai Presiden

<sup>1</sup>Cf. "White Africa's last stand", Newsweek, 16 September 1974.



Republik. Kedua anggota Sekretariat lainnya ialah Joao Vieira, Ketua Majelis Nasional Rakyat, dan Francisco Mendes, Ketua Dewan Komisaris atau Perdana Menteri.

Komite Sentral, yang sejak 1973 mempunyai 65 orang anggota, berfungsi sebagai parlemen bayangan dan mempunyai lima komisi, masing-masing untuk pengawasan, keamanan, hubungan luar negeri, pembangunan nasional dan organisasi serta orientasi partai. Berlainan dengan organisasi-organisasi gerilya lainnya, PAIGC selalu mengutamakan organisasi politik di atas organisasi militer. Pimpinan politik sekaligus juga merupakan pimpinan militer.

Selanjutnya Komite Sentral memilih Komite Eksekutif, yang berfungsi sebagai biro politik atau pemerintah bayangan dan kini terdiri dari 24 orang anggota. Suatu Dewan Perang, terdiri atas anggota-anggota Komite Eksekutif, memimpin sayap militer partai, yaitu angkatan bersenjata revolusioner rakyat, yang meliputi satuan-satuan gerilya, tentara dan militia rakyat. Menurut perkiraan, PAIGC kini mempunyai sekitar 10.000 orang bersenjata yang terlatih.

Pada bulan Juli 1973 PAIGC mengadakan kongresnya yang kedua. Pada kesempatan itu susunan pimpinan sedikit dirubah dan Aristides Pereira, yang sejak pembunuhan Amilcar Cabral berfungsi sebagai penjabat Sekjen, dikukuhkan sebagai Sekjen. Kongres juga memutuskan, bahwa parlemen akan mengumumkan kemerdekaan Guinea Bissau pada sidangnya yang pertama.

### Sistim partai tunggal

Seperti banyak negara Afrika lainnya, Guinea Bissau menganut sistim partai tunggal. Kekuasaan adalah pada PAIGC yang lahir dan berkembang sebagai partai nasionalis utama yang aktif melawan penjajahan sehingga diakui sebagai satu-satunya wakil rakyat dan dalam kodudukannya itu mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Portugis. Bertolak dari asumsi bahwa sistim partai tunggal itu adalah sistim yang paling baik untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Guinea Bissau, terutama karena merupakan mekanisme yang paling baik untuk menggalang persatuan nasional dan menggerakkan partisipasi rakyat dalam proses modernisasi dan pembangunan, pemimpin-pemimpin PAIGC menolak tuntutan partai-partai lain seperti FLING dan BDG untuk diikutsertakan dalam pemerintahan. Lagi pula PAIGC merasa cukup kuat untuk menghadapi perlawanan partai-partai tersebut.

### Majelis Nasional Rakyat

Fungsi legislatif adalah pada Majelis Nasional Rakyat, yang terdiri dari 120 orang anggota, yaitu 72 orang pilihan dewan-dewan regional, 5 orang wakil serikat-serikat buruh, 3 orang wakil mahasiswa-mahasiswa, dan 40 orang yang ditunjuk oleh pimpinan partai. Ketuanya ialah Joao Vieira, anggota Sekretariat Permanen partai. Akan tetapi perranannya sebagai forum debat bagi kebijaksanaan pemerintah menjadi sangat berkurang. Majelis hampir semata-mata berfungsi untuk mengesahkan keputusan-keputusan partai, yang dipandang sebagai badan legislatif tertinggi karena dianggap mewakili seluruh rakyat. Haluan politik nasional tidak dibicarakan dan ditetapkan dalam parlemen, tetapi dalam Kongres partai. Demikianpun undang-undang tidak dipikirkan dan dibuat dalam parlemen, tetapi dalam Komite Sentral partai yang dengan tepat disebut parlemen bayangan.

### Dewan Eksekutif

Dalam teori fungsi pemerintah adalah pada Dewan Eksekutif yang terdiri atas 16 orang komisaris dan sub komisaris di bawah pimpinan seorang ketua<sup>1</sup>. Akan tetapi sama halnya dengan Majelis Nasional, dalam kenyataan peranannya tidak besar. Dewan hampir semata-mata berfungsi sebagai pelaksana kebijaksanaan yang digariskan oleh Komite Eksekutif atau biro politik partai, yang oleh sebab itu juga disebut pemerintah bayangan. Dengan demikian pada analisa terakhir partailah yang menjalankan fungsi legislatif maupun eksekutif.

### IV. Masalah-masalah dan prospek

Sebagai negara muda yang kecil, miskin dan terbelakang Guinea Bissau menghadapi banyak masalah, akan tetapi kiranya akan dapat mengatasinya secara berangsur-angsur, antara lain karena memiliki berbagai hal yang menguntungkan.

<sup>1</sup>Ditambah menjadi 10 menteri dan 9 menteri muda (A. 10/9/74).



## 1. Masalah-masalah

Salah satu masalah penting yang dihadapi negara baru itu ialah penyaluran sekitar 15.000 orang bersenjata yang selama ini berdinam dalam angkatan bersenjata perang Portugis, khususnya serdadu-serdadu profesional di antara mereka<sup>1</sup>. Dalam persetujuan tanggal 26 Agustus tersebut, Pemerintah Portugis berjanji akan mengadakan demobilisasi; tetapi dapat ditanyakan apakah mereka itu bersedia kembali ke kehidupan sipil. Kehadiran sekian banyak orang bersenjata dapat mengancam keamanan negara dan menimbulkan kekacauan. Paling tidak angkatan bersenjata Guinea Bissau menghadapi suatu tugas yang berat.

Masalah lain ialah Partai Front untuk Pembebasan dan Kemerdekaan Guinea Portugis (FLING) dan Partai Blok Demokrasi Guinea Bissau (BDG), yang tidak hanya berjuang untuk mempertahankan eksistensinya, tetapi juga untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan dalam pemerintahan, biarpun tidak pernah aktif melawan penjajah. Kedua partai itu tidak akan membiarkan PAIGC memonopoli kekuasaan tanpa mengadakan perlawanan.

Sumber kesukaran lain ialah kenyataan bahwa penduduk Guinea Bissau belum merupakan suatu bangsa yang kompak, tetapi terdiri atas lebih dari 20 suku yang tidak hanya terpisah satu sama lain tetapi juga saling bersaing dan bahkan bermusuhan. Perang kemerdekaan telah meningkatkan perpecahan dan permusuhan itu. Pemerintah kolonial mendapatkan pendukung-pendukung loyal di kalangan suku Fulani sedangkan pemimpin-pemimpin nasionalis banyak yang berasal dari suku Balanta. Kaum nasionalis selama perang kemerdekaan tidak hanya menghadapi orang-orang Portugis tetapi juga orang-orang suku yang loyal tersebut. Tidak mustahil permusuhan antar suku itu bahkan meningkat menjadi perang saudara seperti terjadi di Nigeria tahun 1967-1971. Untuk mengatasinya diperlukan suatu kebijaksanaan tinggi, terutama karena bekas pendukung-pendukung Portugal itu bersenjata.

Masalah lain yang tidak kurang beratnya ialah dalam bidang ekonomi. Seperti kita lihat di atas, Guinea Bissau adalah suatu negeri kecil yang miskin dan terbelakang. Mayoritas penduduknya masih terlibat dalam pertanian subsistensi dan belum banyak mengenal ekonomi uang. Kekayaan alam tidak banyak dan industri hampir belum ada. Lambat laun negeri akan dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, tetapi dalam waktu dekat ini pangan merupakan suatu

---

<sup>1</sup>Cf. Antara, 30 Juni 1974.



masalah karena untuk sebagian harus diimpor. Selain itu penarikan sekitar 30.000 orang pasukan Portugis berarti suatu pukulan berat bagi perekonomian negeri karena mereka merupakan pasaran yang penting. Untuk mereka Pemerintah Portugis setiap bulan mengeluarkan sekitar 92 juta eskudo atau 1.800 juta rupiah yang untuk sebagian besar dibelanjakan dalam negeri. Neraca pembayaran juga akan mengalami kegoncangan dengan penarikan mereka, karena selama ini gaji mereka tidak hanya dapat menutup defisit perdagangan tetapi bahkan juga mengakibatkan suatu surplus pembayaran<sup>1</sup>.

Selama perang kemerdekaan terjadi suatu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Banyak orang meninggalkan kampung halaman mereka untuk menghindari pertempuran-pertempuran dan pergi ke tempat-tempat yang lebih aman. Selain itu di daerah-daerah yang dikuasai tentara Portugis penduduk dikumpulkan di desa-desa yang dijadikan benteng dalam rangka pasifikasi yang dirintis Jendral Schultz untuk merebut hati rakyat. Desa-desa itu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, pertokoan dan sebagainya, sehingga lambat laun menarik orang-orang daerah sekitarnya. Setelah perang berakhir dan daerah menjadi aman kembali, kebanyakan ingin kembali ke kampung halaman mereka dan mengolah tanah mereka. Akan tetapi kebanyakan desa asal mereka telah rusak dan tanahnya menjadi hutan belukar. Untuk memulai hidup baru mereka memerlukan banyak bantuan.

Kepulauan Cabo Verde juga merupakan suatu masalah. Seperti terungkap dalam namanya, Partai Afrika Untuk Kemerdekaan Guinea dan Cabo Verde memperjuangkan penyatuan Guinea Bissau dan kepulauan itu menjadi satu negara, terutama karena banyak pemimpinnya berasal dari kepulauan itu. Akan tetapi Portugal menentangnya karena berpendapat, bahwa hal itu harus diputuskan oleh rakyat Cabo Verde sendiri. Sebagai jalan tengah dicapai sepakat kata bahwa pada waktunya akan diadakan suatu referendum di kepulauan itu untuk menentukan hari depannya.

## 2. Prospek Guinea Bissau

Dengan demikian pemimpin-pemimpin Guinea Bissau menghadapi suatu tugas yang berat dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang perlu untuk memperbaiki nasib rakyatnya. Akan tetapi rupanya mereka secara berangsur-angsur akan dapat mengatasinya.

<sup>1</sup>Cf. "Free at last", Newsweek, 9 September 1974; "10 September 1974: Guinea-Bissau Lahir", Kompas, 14 September 1974; "Image of Guinea-Bissau changing as peace returns", AFP/10, 24 September 1974.



Berkat kebijaksanaan dan perjuangan Amilcar Cabral dan kawan-kawan, PAIGC rupanya telah siap untuk memikul tanggung jawab memimpin negara. Selain mempunyai suatu organisasi politik maupun militer yang baik, partai berhasil mendapatkan dukungan cukup luas di kalangan rakyat, antara lain karena berhasil membangun sel-sel di daerah pedesaan dan melaksanakan suatu program pembangunan di daerah-daerah yang dibebaskannya. Lagi pula partai berhasil membentuk suatu kader baik dalam jumlah yang mencukupi. Dengan bantuan luar negeri partai berhasil mengirimkan banyak orang yang berbakat ke luar negeri untuk belajar menjadi teknikus, dokter, ahli hukum, guru, perawat dan lain sebagainya. Pengalaman yang diperoleh selama perang gerilya juga merupakan suatu modal yang berharga.

PAIGC rupanya juga cukup kuat untuk menghadapi perlawanan partai-partai lain dan pertentangan antar suku, tidak hanya karena mempunyai angkatan bersenjata sekitar 10.000 orang pasukan yang terlatih baik, berdisiplin dan berpengalaman menghadapi musuh, tetapi juga karena dukungan rakyat tersebut. Dengan demikian pemerintah mampu mencegah timbulnya perlawanan bersenjata dan perang antar suku. Perlawanan suku-suku yang loyal terhadap Portugal kiranya berkurang sebagai hasil persetujuan antara Portugal dan PAIGC tersebut. Tugas nation building adalah berat, tetapi secara berangsur-angsur dapat diselesaikan.

Demobilisasi pasukan-pasukan Portugis yang berkobangsaan Afrika kiranya dapat dijalankan dengan baik pula. Sesuai dengan persetujuan tersebut, pemerintah Portugis langsung mulai melucuti pasukan-pasukan itu dengan memboli kembali senjata yang selama ini mereka pakai dengan harga yang menarik. Kelompok para militer, sekitar 8.000 orang, kiranya dapat disalurkan kembali ke tempat asal mereka di mana mereka mungkin dapat menjadi penggerak pembangunan. Serdadu-serdadu profesional, sekitar 7.000 orang, lebih sukar disalurkan ke kehidupan sipil, tetapi setelah dilucuti senjatanya tidak akan dapat berbuat banyak untuk menimbulkan kerusuhan. Lagi pula sebagian kiranya dapat diintegrasikan dalam angkatan bersenjata nasional secara individu.

Pembangunan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat memang merupakan suatu tugas yang berat. Akan tetapi Guinea Dissau mempunyai modal yang berharga dalam kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama peperangan. Untuk merobut hati rakyat dan mempertahankan kekuasaannya, pemerintah kolonial Portugis selain operasi-operasi militer juga melancarkan suatu kampanye pasifikasi yang mencakup suatu program pembangunan yang cukup luas seperti perluasan prasarana, fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, pembangunan



pertanian dan lain sebagainya. Sebagai tanggapan PAIGC juga meluncurkan suatu program pembangunan di daerah-daerah yang telah dibebaskan dan selain itu juga membangun suatu sistem administrasi yang teratur, termasuk peradilan. Menurut laporan, Guinea Bissau telah lebih banyak mengalami kemajuan selama peperangan itu dari pada sebelumnya. Setelah peperangan berakhir, pemerintah dan PAIGC dapat lebih mengerahkan tenaga dan dana untuk mengembangkan perekonomian dan prasarananya. Lagi pula dalam usaha pembangunan itu mereka dapat mengharapkan bantuan luar negeri, tidak hanya dari negara-negara dan badan-badan internasional yang selama ini membantu PAIGC, tetapi juga dari Portugal dan PBB yang telah menjanjikannya.

Kepulauan Cabo Verde untuk sementara masih diporintah Portugal sebagai salah satu propinsi seberang lautannya, akan tetapi sesuai dengan persetujuan tersebut PAIGC bebas mengadakan propaganda dan mempengaruhi rakyatnya agar memilih persatuan dengan Guinea Bissau. Hasil referendum sukar diramalkan, tetapi PAIGC rupanya mempunyai kemungkinan menang yang besar, antara lain karena banyak anggotanya berasal dari kepulauan itu dan perjuangannya banyak mendapat dukungan. Lagi pula penggabungan kedua negeri itu akan menguntungkan keduanya dan meningkatkan kemampuan negara baru untuk mengatasi masalah-masalahnya. Cabo Verde berpenduduk sekitar 225.000 orang yang umumnya lebih terdidik dari penduduk Guinea Bissau, akan tetapi negeri mereka kurang mampu menjamin suatu penghidupan yang layak. Dapat dikatakan, bahwa kedua negeri itu dapat saling melengkapi. Guinea Bissau memerlukan tambahan penduduk dan tenaga-tenaga terdidik untuk pembangunannya. Cabo Verde dapat memenuhi kebutuhan itu dan sekaligus mengurangi tekanan penduduk yang dialaminya. Selain itu Cabo Verde tidak dapat berdiri sendiri sebagai negara merdeka, sedangkan persatuan dengan Portugal dilihat sebagai bentuk neo-kolonialisme. Lagi pula sebagian penduduk Guinea Bissau berasal dari Cabo Verde dan di kedua negeri itu digunakan bahasa resmi yang sama.

## 7. Kesimpulan

Sobagaimana telah diuraikan di muka, bekas negeri jajahan Portugis Guinea Bissau telah berhasil mendapatkan kemerdekaan karena berbagai faktor yang menguntungkan. Perjuangan kaum nasionalis PAIGC, termasuk perang gerilya yang makin lama makin efisien, tekanan internasional yang semakin kuat, dan keyakinan Pemerintah baru



Portugal bahwa konflik dengan kaum nasionalis tidak dapat diselesaikan secara militer dan oleh sebab itu harus dicari suatu penyelesaian politik, semuanya itu telah mendorong Portugal untuk melepaskan politik kolonialnya dan memulai suatu proses dekolonisasi. Dengan perkataan lain, kemerdekaan Guinea Bissau itu adalah hasil perjuangan kaum nasionalis dan kekuatan-kekuatan anti kolonial di satu pihak dan hasil politik baru Portugal di lain pihak.

Kemerdekaan Guinea Bissau itu dapat disambut dengan gembira, tidak hanya karena berarti bahwa suatu negeri jajahan mendapatkan haknya atas kemerdekaan, melainkan juga karena konsolidasi-konsolidasinya. Dapat diperkirakan, bahwa kemerdekaan itu akan mempercepat proses dekolonisasi, tidak hanya negeri-negeri jajahan Portugis lainnya melainkan juga negeri-negeri yang dikuasai rejim minoritas kulit putih, khususnya Rhodesia dan Afrika Selatan. Di kedua negeri yang terakhir ini tekanan baik intern maupun ekstern akan semakin meningkat sampai rejim yang berkuasa itu merubah politiknya dan mengakui hak-hak demokrasi rakyat Afrika yang merupakan mayoritas.

Oleh sebab itu kemerdekaan Guinea Bissau sebagai implementasi politik dekolonisasi Portugal menimbulkan keprihatinan dan kekecewaan di Rhodesia dan Afrika Selatan. Sebagai tanggapan, rejim minoritas kulit putih dapat meningkatkan kemampuan militernya untuk mempertahankan dominasinya atas mayoritas rakyat dan kedudukan istimewa, akan tetapi dapat diragukan kemampuannya untuk membendung proses dekolonisasi selama-lamanya. Menurut perhitungan, Rhodesia tidak akan dapat bertahan lama dan mencegah pembentukan pemerintahan mayoritas negro. Setelah Rhodesia jatuh, Afrika Selatan akan sukar bertahan melawan perang gerilya yang dengan bantuan negara-negara Afrika dan OAU akan ditingkatkan secara drastis dan perlawanan rakyat negro. Akhirnya rejim minoritas kulit putih akan terpaksa melepaskan politik apartheidnya dan membentuk majority rule atau bertempur sampai hancur.

Dengan pengakuan kemerdekaan itu perjuangan PAIGC dan rakyat Guinea Bissau belum berakhir. Kemerdekaan bukanlah tujuan terakhir, melainkan suatu sarana untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, yaitu kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat.

Sehubungan dengan itu Guinea Bissau harus menyelesaikan sejumlah masalah yang dihadapinya. Yang penting ialah penyaluran sekitar 15.000 orang Guinea Bissau yang sebelumnya berdinam dalam angkatan perang Portugis, partai-partai politik lain yang berusaha

untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan dalam pemerintah baru, persaingan dan pertentangan antar suku, masalah pengungsi, kesukaran-kesukaran ekonomi dan persoalan Cabo Verde. Dengan demikian Guinea Bissau menghadapi suatu tugas yang berat.

Namun negara baru itu mempunyai suatu peluang yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dan menjalankan tugas pembangunannya. PAIGC rupanya telah siap untuk tugas itu. Selain memiliki suatu organisasi politik maupun militer yang baik, partai itu juga berhasil membentuk sel-sel sampai tingkat desa, mendapatkan dukungan rakyat yang cukup luas, membentuk suatu kader yang baik, dalam jumlah yang mencukupi untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Berkat semuanya itu partai mampu untuk membentuk suatu pemerintah yang stabil dan kompeten, dan menjaga ketertiban dan keamanan. Selain itu kemajuan yang dicapai selama peperangan sebagai hasil program pembangunan PAIGC maupun orang-orang Portugis merupakan suatu modal pembangunan yang berharga. Sementara itu Guinea Bissau dapat mengharapkan bantuan baik dari negara-negara dan lembaga-lembaga internasional yang selama ini membantu PAIGC maupun dari pemerintah Portugis dan PBB yang telah menjanjikannya.

Kemungkinan besar Guinea Bissau juga akan dapat menyelesaikan persoalan Cabo Verde dengan baik. Paling tidak PAIGC mempunyai suatu peluang yang baik untuk memenangkan referendum yang direncanakan di negeri itu. Penggabungan kedua negeri itu menjadi satu negara akan menguntungkan keduanya dan meningkatkan kemampuan Guinea Bissau untuk mengatasi masalah-masalahnya dan menjalankan tugasnya, terutama karena mereka saling melengkapi.



## PERGOLAKAN DI ETHIOPIA

Kirdi DIPOYUDO

### Pengantar

Dalam suatu kudeta tak berdarah pada tanggal 12 September 1974, Angkatan Bersenjata Ethiopia di bawah suatu komite koordinasi pemberhentikan Kaisar Haile Selassie dan mengambil alih kekuasaan. Kudeta ini adalah puncak suatu gerakan yang dimulai enam bulan sebelumnya ketika Angkatan Bersenjata melancarkan demonstrasi-demonstrasi untuk menuntut kenaikan gaji, penggantian pemerintah dan pembaharuan-pembaharuan. Diarpun Kaisar memberikan konsesi-konsesi, gerakan itu secara berangsur-angsur ditingkatkan. Secara berturut-turut Angkatan Bersenjata menangkap menteri-menteri dan pejabat-pejabat tinggi yang dituduh melalaikan tugas, menyalahweng dan melakukan korupsi, membubarkan lembaga-lembaga kekuasaan kekaisaran, menasionalisir istana-istana, tanah dan perusahaan-perusahaan Kaisar dan akhirnya menurunkannya dari takhta, membubarkan kedua majelis parlemen dan membekukan konstitusi. Setelah mengambil alih kekuasaan Angkatan Bersenjata mulai melakukan pembaharuan-pembaharuan dan dalam rangka itu menunjuk suatu komisi untuk menyiapkan suatu konstitusi baru sebagai dasar dan kerangka hukum orde baru yang diperjoangkannya dan yang berkisar pada demokrasi dan keadilan sosial.

Tulisan ini bermaksud menganalisa pergolakan itu dan secara berturut-turut membahas faktor-faktor yang telah mendorong perwira-perwira muda yang merupakan otak dan dalang gerakan Angkatan Bersenjata itu untuk bertindak, maksud tindakan-tindakan mereka, tugas yang mereka hadapi untuk menyelesaikan perjuangan mereka, masalah-masalah yang mempersulit tugas itu dan prospek perjuangan mereka itu.

### 1. Faktor-faktor Gerakan Angkatan Bersenjata

Berbagai faktor telah mendorong Angkatan Bersenjata Ethiopia untuk melancarkan kampanye yang mencapai puncaknya dalam pengusiran Kaisar Haile Selassie itu. Salah satu yang penting ialah



sifat otoriter dan represif rejim yang berkuasa. Di atas kertas sejak tahun 1930 Ethiopia adalah suatu kerajaan konstitusional di mana kekuasaan Kaisar sebagai Kepala Eksekutif dibatasi dan diimbangi oleh parlemen yang terdiri atas dua majelis dan suatu lembaga kehakiman yang bebas. Akan tetapi kenyataannya rejim Ethiopia adalah suatu diktatur yang ketat dan represif. Kaisar memerintah sebagai seorang otokrat dengan kekuasaan tak terbatas. Dia mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri dan Menteri lain-lain sesuai dengan kemauannya dan mempunyai kekuasaan luas dalam pemerintahan, Dewan Perwakilan dan Senat, kedua majelis parlemen, tidak banyak berarti dan hampir semata-mata berfungsi sebagai penasihat Kaisar dan pengesah keputusan-keputusannya. Kekuatan-kekuatan politik sebenarnya ialah angkatan bersenjata, kaum bangsawan yang hampir semuanya tuan tanah dan gereja Koptis yang juga memiliki tanah yang luas. Kaisar mengawasi ketiga kekuatan itu dan berusaha memelihara keseimbangan antara mereka. Untuk mencegah salah satu mendapatkan terlalu banyak kekuasaan, dia memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri dan secara teratur mengadakan perputaran penjabat-penjabat yang menduduki posisi-posisi kunci. Dalam sistem kekuasaan itu tiada tempat bagi partai-partai politik dan mereka yang mengecam kebijaksanaan pemerintah dan membahayakan kedudukannya ditanah<sup>1</sup>. Salah satu tuntutan angkatan bersenjata ialah pembebasan tahanan-tahanan politik dan kebebasan politik bagi rakyat.

Faktor penting lain ialah susunan feodal masyarakat di mana kaum bangsawan menduduki tempat-tempat penting dalam pemerintahan dan memiliki sebagian besar tanah. Mereka memperlakukan para petani yang menggarap tanah mereka sebagai bawahan yang harus melayani mereka. Dua pertiga hasil tanah, harus diserahkan kepada mereka. Sebagai akibatnya para petani hidup dalam keadaan serba kekurangan biarpun giat bekerja, sedangkan tuan-tuan tanah menjadi kaya<sup>2</sup>. Untuk mempertahankan kedudukan yang istimewa itu dan kekuasaan mereka atas para petani, kebanyakan tuan tanah itu memiliki laskar-laskar bersenjata. Sehubungan dengan itu Komite Koordinasi Angkatan Bersenjata menuntut agar diadakan land reform.

Faktor ketiga ialah aparat pemerintah yang lemah dan kurang mampu, disebabkan oleh adanya fragmentasi fungsi antara berbagai departemen dan lembaga, duplikasi pekerjaan dan konsentrasi

<sup>1</sup>Cf. "The Lion caged", dalam Newsweek, 26 Agustus 1974, hal. 22; "Ethiopia", dalam Encyclopaedia Americana (New York, 1971), X, hal. 546.

<sup>2</sup>Cf. "Unhappy peasants", dalam Newsweek, 8 April 1974, hal. 22.



jabatan-jabatan penting pada orang-orang tertentu. Sebagai akibatnya tiada koordinasi yang baik dan efisiensi berkurang. Selain itu kemampuan, semangat dan sikap pegawai negeri umumnya kurang menunjang pembangunan ekonomi. Kebanyakan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara dan masyarakat, sehingga banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kedudukan, dan korupsi merajalela<sup>1</sup>. Sesuai dengan alam feodal rakyat dianggap sebagai bawahan yang dapat diperbudak dan diperas, dan milik negara diperlakukan sebagai milik pribadi. Secara demikian kekayaan menumpuk di tangan sedikit orang dan perbedaan antara kaya dan miskin sangat menyolok. Sehubungan dengan itu angkatan bersenjata menuntut agar korupsi diberantas sampai akar-akarnya dan para pejabat yang korup dijatuhi hukuman yang berat.

Dengan demikian pemerintah kurang mampu menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan prasarana. Pendidikan masih sangat terbatas. Lebih dari 90% penduduk masih buta huruf dan di segala bidang terdapat suatu kekurangan tenaga terdidik pada semua tingkat. Kebanyakan pegawai negeri tidak memiliki kecakapan untuk menjalankan roda pemerintahan negara dan pembangunan yang diperlukan untuk memperbaiki tingkat hidup rakyat<sup>2</sup>.

Faktor lain ialah kegagalan pemerintah untuk menghadapi bencana kekeringan yang lama dan banyak minta korban pada tahun 1973. Berjuta-juta ekor ternak mati, panen gagal sehingga pangan menjadi masalah, dan sekitar 100.000 orang meninggal karena kelaparan sebelum kabinet mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya<sup>3</sup>. Akan tetapi langkah-langkah itu sangat kurang memadai, tidak hanya karena sukarnya pengangkutan bantuan pangan ke daerah-daerah bencana, tetapi juga karena kurangnya rasa tanggung jawab pejabat-pejabat dan petugas-petugas yang bersangkutan. Banyak bantuan luar negeri tidak pernah sampai pada orang-orang yang dimaksud tetapi menghilang di tengah jalan. Juga atas desakan kaum cendekiawan dan mahasiswa-mahasiswa yang sangat tidak puas dengan kelalaian dan inefisiensi yang banyak minta korban itu, Komite Koordinasi menuntut agar para pejabat yang bertanggung jawab diajukan ke muka pengadilan.

---

<sup>1</sup> Cf. "The non-coup coup", Newsweek, 15 Juli 1974, hal. 18; Detlev Karsten, "Ethiopia. Economy", dalam Africa South of the Sahara 1972 (London, 1972), hal. 288-293, khususnya hal. 289.

<sup>2</sup> Cf. Detlev Karsten, "Ethiopia. Economy", ibid. hal. 288.

<sup>3</sup> Cf. "The Lion at bay", dalam Newsweek, 11 Maret 1974, hal. 12.



Faktor kelima ialah mengganasnya inflasi sebagai akibat gagal-nya panen karena kekeringan tersebut dan melonjaknya harga minyak. Harga barang-barang keperluan hidup meningkat dan pemerintah ternyata tidak mampu menolkannya<sup>1</sup>. Maka timbullah amarah dan kekecewaan di kalangan rakyat. Karenanya dikemukakan tuntutan supaya harga-harga diturunkan.

Mengingat sistim pemerintahan yang berlaku, pada analisa terakhir Kaisarlah yang dianggap bertanggung jawab dan kenyataannya dia disalahkan sebagai faktor utama kepincangan-kepincangan sosial tersebut. Dia disalahkan tidak berbuat apa-apa untuk mengatasi masalah-masalah itu dan membiarkan pejabat-pejabat menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan korupsi besar-besaran secara yang sangat merugikan negara dan rakyat<sup>2</sup>. Selain itu dia juga dituduh telah memperkaya diri dengan uang negara dan menyimpannya di bank-bank di Swis. Menurut perkiraan sementara orang jumlahnya mencapai \$10 milyar, suatu jumlah yang luar biasa. Komite Koordinasi minta kepadanya agar menarik jumlah itu dan menyerahkannya kepada negara. Penolakannya merupakan salah satu alasan mengapa dia diturunkan dari takhta<sup>3</sup>. Menggelapkan uang negara dan menyimpannya di luar negeri, padahal uang itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan dalam negeri, dilihat sebagai suatu tindakan kriminal yang serius. Kenyataannya praktik itu, yang tidak hanya dilakukan oleh Kaisar tetapi juga oleh banyak pejabatnya, adalah salah satu penyebab kemiskinan dan keterbelakangan Ethiopia, yang mengakibatkan penderitaan berjuta-juta orang rakyatnya.

Akhirnya perlu disebutkan demonstrasi-demonstrasi yang makin banyak dilancarkan mahasiswa-mahasiswa, kaum buruh dan golongan-golongan lain untuk memprotes kepincangan-kepincangan sosial tersebut dan menuntut perbaikan-perbaikan. Semuanya itu ikut memperkuat keyakinan perwira-perwira muda yang memimpin gerakan angkatan bersenjata itu bahwa diperlukan perubahan-perubahan dan mendorong mereka untuk bertindak dan melancarkan kampanye mereka<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Cf. "The non-coup coup", Dalam Newsweek, 15 Juli 1974, hal. 18.

<sup>2</sup>Cf. "Ethiopia", dalam Encyclopaedia Americana, X, hal. 546; "Time catches up with the Old Lion", dalam Newsweek, 23 September 1974, hal. 22-23.

<sup>3</sup>Cf. "Time catches up with the Old Lion", ibid. hal. 27; berita Reuter yang dimuat Antara, 12 September 1974.

<sup>4</sup>Cf. "The Lion at bay", dalam Newsweek, 11 Maret 1974, hal. 12.



## 2. Maksud Gerakan Angkatan Bersenjata

Dari tuntutan-tuntutan yang diajukan kepada Kaisar<sup>1</sup>, dan tindakan-tindakan yang diambil oleh angkatan bersenjata, dapat disimpulkan, bahwa maksud kampanye itu bukanlah semata-mata kenaikan gaji dan perbaikan nasib ataupun penggantian pemerintah, penangguhan, penahanan dan pengadilan penjabat-penjabat yang menyeleweng atau melalaikan tugasnya, melainkan perubahan-perubahan radikal baik dalam masyarakat maupun dalam hidup kenegaraan. Berdasarkan asumsi, bahwa orde yang ada busuk sampai akar-akarnya dan tidak dapat diperbaiki secara tambal sulam, kampanye mereka bertujuan untuk menjebol orde lama itu dan menggantinya dengan orde baru yang menjamin hak-hak azasi, termasuk kebebasan-kebebasan, dan keadilan sosial.

Dalam rangka itu Kaisar Haile Selassie dipaksa turun takhta, tidak hanya karena kesalahan-kesalahan dan kegagalannya menghentikan inflasi, salah urus pemerintah, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan penjabat-penjabat, meningkatnya pengangguran dan lain sebagainya, melainkan juga sebagai penghambat perubahan-perubahan radikal yang perlu untuk memperbaiki masyarakat dan meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dengan demikian yang dimaksud dan diperjuangkan Komite Koordinasi Angkatan Bersenjata pada dasarnya adalah suatu revolusi, suatu perubahan mendalam dalam pemerintahan dan masyarakat dalam waktu singkat<sup>2</sup>. Bukan hanya perbaikan tambal sulam, tetapi perubahan-perubahan total yang mendalam. Orde lama harus ditumbangkan dan orde baru dibangun sebagai gantinya. Akan tetapi revolusi ini berbeda dengan revolusi-revolusi lainnya dalam arti bahwa revolusi ini dilakukan tahap demi tahap secara sistematis di mana setiap tahap menyiapkan tahap berikutnya, sampai akhirnya kekuasaan tertinggi ditumbangkan<sup>3</sup>.

Angkatan Bersenjata bertindak secara berhati-hati dan tahap demi tahap karena menyadari bahwa mereka menghadapi perlawanan kuat dari kekuatan-kekuatan politik lainnya, yaitu kaum bangsawan dan pemimpin-pemimpin gereja yang sebagai golongan vested interest

<sup>1</sup>Cf. "Kericuhan di Ethiopia", Antara, 28 Maret 1974; "The Lion of Judah", Newsweek, 26 Agustus 1974, hal. 23.

<sup>2</sup>Cf. "More Trouble ahead", dalam Newsweek, 18 Maret 1974, hal. 13.

<sup>3</sup>Cf. "Time catches up with the Old Lion", dalam Newsweek, 23 September 1974, hal. 27; "Six months crisis in Ethiopia ends", laporan UPI yang dikutip Indonesian Observer, 14 September 1974.

berkepentingan dengan kelangsungan sistim feodal dan oleh sebab itu akan berusaha menggagalkan setiap usaha untuk menghancurkan sistim itu<sup>1</sup>. Seperti diketahui, mereka itu merupakan suatu kekuatan yang besar, tidak hanya karena mempunyai kedudukan penting dalam pemerintahan dan masyarakat, tetapi juga karena kebanyakan memiliki laskar-laskar bersenjata. Lagi pula rakyat yang menghormati Kaisar sebagai seorang dewa dan loyal secara mutlak kepadanya harus disiapkan secara psikologis lebih dahulu. Tanpa persiapan semacam itu mereka akan mudah dibakar untuk melawan suatu pemberontakan yang ditujukan terhadap Kaisar<sup>2</sup>. Sikap berhati-hati dan pentahapan itu kenyataannya merupakan salah satu faktor suksesnya. Kudeta berhasil tanpa pertumpahan darah dan rakyat tidak hanya tidak memberikan perlawanan, tetapi juga menyambutnya dengan gembira setelah diyakinkan bahwa sumber penderitaan mereka adalah pemerintah dan Kaisar. Selanjutnya rakyat menaruh harapan akan perbaikan-perbaikan atas Angkatan Bersenjata, khususnya Komite Koordinasi yang menjadi otak dan dalang revolusi itu.

Pada tahap terakhir Komite Koordinasi mengambil alih kekuasaan sepenuhnya, memberhentikan Kaisar, membubarkan parlemen yang tidak dipilih rakyat secara demokratis dan yang sejauh itu sangat mengecewakan, membekukan konstitusi yang merupakan dasar hukum orde lama, dan membentuk suatu rejim militer sementara yang bertugas untuk menyelesaikan pembersihan aparatur pemerintah dan menyiapkan lahirnya orde baru<sup>3</sup>. Sehubungan dengan itu Komite Koordinasi membentuk suatu komisi penasihat sipil untuk menyusun rancangan konstitusi baru dan menetapkan suatu prosedur bagi pembentukan suatu pemerintah sipil, yang pada waktunya akan menggantikan pemerintah militer sementara.

### 3. Revolusi Ethiopia belum selesai

Sejauh ini kampanye Angkatan Bersenjata berjalan dengan lancar dan berhasil baik. Pemerintah lama yang tidak mampu diberhentikan dan diganti dengan suatu pemerintah sementara yang menyiapkan penyusunan orde baru. Penjabat-penjabat yang menyeloweng dan menyalahgunakan kedudukan serta kekuasaan tanpa pandang bulu ditangkap dan ditahan untuk diadili. Korupsi yang selama ini merupakan

<sup>1</sup>Cf. "More trouble ahead", dalam Newsweek, 18 Maret 1974, hal. 12.

<sup>2</sup>Cf. "The Lion caged", Newsweek, 26 Agustus 1974, hal. 22.

<sup>3</sup>Cf. Antara, 12 dan 13 September 1974.

<sup>4</sup>Cf. Laporan AFP yang dimuat Antara, 23 September 1974.



salah satu penyakit Ethiopia yang parah sedang dalam proses pemberantasan. Parlemen dibubarkan, konstitusi dibekukan dan Kaisar Haile Selassie diberhentikan dan ditahan sebagai orang yang pada analisa terakhir bertanggung jawab atas kepincangan-kepincangan sosial negeri.

Akan tetapi semuanya itu baru sebagian maksud kampanye Angkatan Bersenjata. Revolusi Ethiopia belum berakhir. Perjuangan masih harus diteruskan untuk membangun orde baru yang meliputi pelaksanaan cita-cita demokrasi dan keadilan sosial<sup>1</sup>. Dalam rangka itu inflasi yang menganas harus dikendalikan dan perekonomian dibangun dengan mengerahkan segala tenaga dan dana yang tersedia. Penanaman modal baik dalam negeri maupun asing harus digalakkan, dan uang negara yang diselewengkan dan disimpan di bank-bank luar negeri ditarik kembali. Sejalan dengan pembangunan ekonomi itu kekayaan negara harus dibagi kembali secara yang wajar lewat suatu land reform, perbaikan sistim perpajakan, sistim pengupahan dan penggajian, perbaikan dan perluasan fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, perhubungan dan pengangkutan, dinas sosial dan lain sebagainya<sup>2</sup>.

Selain itu diperlukan suatu kerangka pemerintahan demokratis yang dapat menjamin hak-hak azasi, termasuk kebebasan-kebebasan, dan terwujudnya kesejahteraan umum. Dengan maksud itu Komite Koordinasi memperjuangkan suatu sistim kerajaan konstitusional yang demokratis, di mana rakyat leluasa mendirikan partai-partai politik dan lewat partai-partai itu ikut serta dalam pemerintahan negara. Secara konkrit sasaran perjuangannya ialah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan adalah pada parlemen, yang dipilih rakyat secara demokratis, sedangkan raja hanya berfungsi sebagai kepala negara dan lambang persatuan<sup>3</sup>.

Dengan demikian rejim militer yang berkuasa di Ethiopia sekarang ini menghadapi suatu tugas yang sangat berat, terutama karena negara itu menderita kekurangan dana dan tenaga yang diperlukan untuk pembangunan<sup>4</sup>. Pertama-tama, Ethiopia adalah salah satu negara yang miskin dan terbelakang di Afrika. Kebanyakan penduduknya, sekitar 80%, masih hidup dari pertanian subsistensi dan belum banyak mengenal ekonomi uang. Pendapatan per jiwa masih rendah,

---

<sup>1</sup> Cf. "More trouble ahead", Newsweek, 18 Maret 1974, hal. 12.

<sup>2</sup> Cf. Laporan AFP yang dikutip Antara, 27 Maret 1974.

<sup>3</sup> Cf. Berita BBC, 13 September 1974; "Time catches up with the Old Lion", Newsweek, 23 September 1974, hal. 22.

<sup>4</sup> Cf. Detlev Karsten, "Ethiopia. Economy", dalam Africa South of the Sahara 1972, hal. 289.

tidak melebihi \$50 setahun! Produksi mineralnya belum banyak dan perdagangan luar negerinya masih berkisar pada satu hasil pertanian, yaitu kopi yang merupakan 2/3 volume ekspor. Walaupun potensi ekonominya besar dalam arti bahwa sekitar 70% tanahnya dapat ditanam dan airnya berlimpah-limpah, Ethiopia tidak mempunyai dana dan keahlian yang diperlukan untuk pembangunannya dalam jumlah yang mencukupi<sup>1</sup>.

Taraf pendidikan rakyat masih rendah. Lebih dari 90% penduduk masih buta huruf (1971) dan fasilitas-fasilitas pendidikan sangat terbatas! Pada tahun 1967 hanya 11% anak usia SD bersekolah. Sebagai salah satu akibatnya Ethiopia kekurangan tenaga kerja terdidik pada segala tingkat<sup>2</sup>.

Ethiopia juga masih terbelakang dalam bidang prasarana. Walaupun terdapat dinas bis antara Addis Ababa dan ibukota-ibukota propinsi, perhubungan dan pengangkutan tidak begitu lancar. Seluruh negeri baru memiliki sekitar 8.000 km jalan baik dan 23.400 km jalan kurang baik<sup>3</sup>. Kurangnya prasarana ini menghambat pembangunan ekonomi.

Hambatan lain yang penting ialah sistim pemilikan tanah feodal di mana kebanyakan petani tidak mempunyai hak milik atas tanah yang digarapnya. Komite Koordinasi merencanakan suatu land reform agar para petani memiliki tanah yang digarapnya dan secara demikian mampu memperbaiki nasib mereka, akan tetapi pelaksanaannya tidak akan mudah. Kaum bangsawan dan gereja yang selama ini memiliki sebagian besar tanah tidak akan membiarkan perubahan sistim pemilikan tanah yang menguntungkan mereka tanpa memberikan perlawanan. Lagi pula banyak petani belum mampu memanfaatkan keuntungan yang akan mereka peroleh dari land reform itu. Selain belum mengenal cara-cara pertanian modern yang menjamin tingkat produksi yang lebih tinggi, mereka juga tidak memiliki modal seperlunya untuk mengolah tanah mereka secara optimal. Sehubungan dengan itu pemerintah harus memberikan banyak bantuan berupa kredit, penyuluhan dan bimbingan.

Kesukaran lain datang dari mahasiswa-mahasiswa yang mengadakan demonstrasi dan menuntut kepada Angkatan Bersenjata agar segera mungkin menyerahkan kekuasaan kepada suatu pemerintah sipil. Komite Koordinasi sebelumnya memberikan janji akan mengadakan pemilihan

<sup>1</sup> Cf. Detlev Karsten, "Ethiopia. Economy", *ibid.* hal. 288-292.

<sup>2</sup> Cf. Detlev Karsten, "Ethiopia. Economy", *ibid.* hal. 288.

<sup>3</sup> Cf. Detlev Karsten, "Ethiopia. Economy", *ibid.* hal. 289.



umum dan menyerahkan kekuasaan kepada parlemen yang akan dibentuk sebagai hasilnya, akan tetapi para mahasiswa meragukan kejujurannya dan khawatir rejim militer tidak akan melepaskan kekuasaan yang telah diperolehnya<sup>1</sup>. Sebagai akibatnya timbulah suatu ketegangan yang dapat meruncing menjadi suatu konfrontasi antara kedua golongan yang telah bekerja sama untuk menumbangkan orde lama.

Akhirnya rejim baru menghadapi gerakan separatis Eritrea, yang dilancarkan Front Pembebasan Eritrea sejak tahun 1963 ketika rejim lama membubarkan federasi Ethiopia-Eritrea dan merubah status Eritrea menjadi salah satu propinsi Ethiopia. Gerakan itu memperjuangkan kemerdekaan, yang berarti pemisahan dari Ethiopia, dan tidak akan berhenti sebelum berhasil, biarpun menyatakan bersedia mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah Ethiopia di bawah pengawasan PBB<sup>2</sup>.

#### 4. Prospek Revolusi Ethiopia

Pada waktu sekarang ini keadaan di Ethiopia belum begitu jelas, sehingga kita sukar mengatakan apakah Angkatan Bersenjata akan berhasil menyelesaikan revolusinya dengan baik. Akan tetapi ada beberapa hal yang dapat menjadi petunjuk. Pertama-tama adalah perwira-perwira muda yang menjadi otak dan dalang gerakan Angkatan Bersenjata. Mereka ini tidak hanya memperhatikan soal-soal militer, tetapi juga banyak menaruh perhatian atas soal-soal ideologi dan politik. Slogan mereka ialah Ethiopia dahulu, demokrasi, kesempatan yang sama, pemberantasan korupsi dan feodalisme, modernisasi, kondisi sosial dan lain sebagainya. Karena tidak berasal dari kalangan bangsawan dan penjabat-penjabat tinggi pemerintah, mereka tidak mempunyai komitmen terhadap establishment dan oleh sebab itu lebih terbuka untuk gagasan-gagasan tersebut. Mereka juga tidak mempunyai tradisi militer dari ayah ke anak, antara lain karena dipaksa masuk Akademi Militer di Harrar untuk mengisi kekurangan sukarelawan.

---

<sup>1</sup>Cf. Laporan AFP yang dimuat dalam Indonesian Observer, 21 September 1974.

<sup>2</sup>Cf. Jean de La Gueriviere, "Ethiopian Crisis. Eritrean threat of secession", The New Standard, 28 September 1974, yang mengutipnya dari Le Monde.

Dengan demikian mereka mudah mengambil tindakan terhadap atasan mereka yang menyoloweng, termasuk panglima-panglima mereka<sup>1</sup>.

Kojadian-kojadian selama ini menunjukkan, bahwa perwira-perwira muda itu adalah orang-orang idealis yang selain keberanian dan keuletan juga memiliki kebijaksanaan dan perhitungan. Biar pun menghadapi banyak kesukaran, mereka berhasil mengambil alih kekuasaan tanpa pertumpahan darah dan dalam proses itu juga berhasil menggalang persatuan yang cukup kompak dalam tubuh Angkatan Bersenjata dan mendapatkan dukungan luas di kalangan rakyat, yang memperkuat kedudukan mereka<sup>2</sup>. Dari penangkapan-penangkapan yang dilakukan selama ini dapat disimpulkan bahwa mereka benar-benar bermaksud membersihkan negara dari penguasa-penguasa dan penjabat-penjabat yang melalaikan tugas, menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan korupsi. Dapat diperkirakan, bahwa mereka akan mengganti penjabat-penjabat itu dengan orang-orang yang kompeten dan bersih, sehingga lambat laun akan tercipta suatu aparat pemerintah yang efisien!

Demonstrasi-demonstrasi yang baru-baru ini dilancarkan oleh mahasiswa-mahasiswa dan serikat-serikat buruh kiranya tidak akan berkombang menjadi suatu konfrontasi yang akan menghambat penyusunan orde baru. Perbedaan pendapat antara mereka dan Angkatan Bersenjata tidak mengenal prinsip, tetapi semata-mata soal waktu. Setelah demonstrasi-demonstrasi itu Komite Koordinasi mengulangi janjinya akan menyerahkan kekuasaan kepada parlemen yang akan dipilih rakyat secara demokratis<sup>3</sup>. Regim militer tidak bermaksud berkuasa untuk selama-lamanya akan tetapi memerlukan waktu untuk mengidentifikasi dan menyingkirkan pendukung-pendukung regim lama dan untuk menetapkan suatu prosedur bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil yang akan merumuskan bentuk pemerintahan demokratis. Rupanya perwira-perwira muda itu menyadari bahwa selama ini regim-regim militer di berbagai negara Afrika tidak mampu memecahkan masalah pembangunan ekonomi yang dapat menjamin suatu kemakmuran yang merata, dan bahwa dari segi lain regim-regim militer itu umumnya merupakan suatu kemunduran karena menghambat pembangunan demokrasi perwakilan.

<sup>1</sup> Cf. Alan Rake, "Ethiopia near a final military takeover", Gemini, yang dimuat dalam The Indonesian Times, 30 Agustus 1974; "Army mutiny in Ethiopia", UPI, yang dimuat dalam Indonesian Observer, 1 Juli 1974.

<sup>2</sup> Cf. "Time catches up with the Old Lion", Newsweek, 23 September 1974, hal. 22.

<sup>3</sup> Cf. Berita AFP yang dimuat dalam Indonesian Observer, 21 September 1974.



Kaisar Haile Selassie telah berkali-kali berjanji akan mengadakan land reform dan empat tahun yang lalu mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada parlemen, tetapi rancangan itu tidak pernah disahkan, terutama karena perlawanan tuan-tuan tanah<sup>1</sup>. Angkatan Bersenjata kiranya akan lebih berhasil dalam hal ini karena telah dapat mematahkan kekuasaan tuan-tuan tanah itu. Lagi pula mereka menyadari bahwa sistim pomilikan tanah feodal itu merupakan salah satu penghambat utama kemajuan dan pembaharuan.

Kebutuhan akan uang untuk membiayai program-program pembangunan tersebut untuk sebagian kiranya akan dapat ditutup dengan bantuan luar negeri yang dapat diperkirakan akan meningkat apabila rejim militer berhasil membangun demokrasi dan menciptakan suatu aparat pemerintah yang kompeten dan bersih. Dalam keadaan semacam itu penanaman modal asing juga akan meningkat.

Dalam politik luar negeri rejim baru itu kiranya tidak akan banyak menjumpai kesukaran untuk melaksanakan programnya yang tidak banyak berbeda dengan program rejim lama, yaitu tidak memihak dalam permusuhan blok-blok, mentaati Piagam PBB dan OAU serta menghormati kewajiban-kewajiban internasional atas dasar saling menghormati dan persamaan derajat, membantu gerakan-gerakan kemerdekaan dan perjuangan untuk mengakhiri kolonialisme, dan memelihara hubungan baik dengan negara-negara Afrika lainnya, terutama Somali dan Kenya<sup>2</sup>.

Perebutan kekuasaan yang terjadi dalam tubuh Dewan Militer dan berakhir dengan tersingkirnya dan tertembak matinya Jendral Andom, yang sejak kudeta tanggal 12 September 1974 memegang jabatan Ketua Dewan Militer, Kepala Pemerintah Sementara merangkap Menteri Pertahanan dan Kepala Negara, dan pembunuhan tanpa proses hukum 20 orang tokoh terkemuka orde lama yang ditahan sejak beberapa waktu, termasuk dua orang bekas Perdana Menteri, sejumlah Menteri, 18 orang Jendral, bekas Panglima AL, dan 2 orang anggota Komite Koordinasi, rupanya tidak akan menyelewengkan jalannya revolusi. Semuanya itu hanya menunjukkan, bahwa kelompok Mayor Mengistu Haile Miriam yang mengikuti garis keras tampil komuka sebagai pemenang dan menjadi dominan. Dengan perkataan lain, semuanya itu hanya berarti suatu radikalisasi rejim militer dan revolusi Ethiopia. Mungkin bahkan dapat dikatakan, bahwa dengan tersingkirnya kelompok Jendral Andom revolusi Ethiopia kembali pada garis semulanya yang radikal. Jendral Andom bukan anggota Komite Koordinasi yang sejak permulaan merupakan otak dan dalang revolusi itu.

<sup>1</sup>Cf. "Unhappy peasants", Newsweek, 8 April 1974, hal. 22.

<sup>2</sup>Cf. Laporan AP dalam The New Standard, 13 September 1974.



Dengan demikian dapat diperkirakan, bahwa revolusi Ethiopia akan berjalan torus, tetapi selanjutnya akan menempuh jalan keras sesuai dengan sasaran-sasarannya, yaitu perubahan-perubahan yang radikal dalam masyarakat dan pemerintahan. Dengan perkataan lain, rejim militer akan meneruskan usahanya untuk melenyapkan sisa-sisa orde orde lama, memberantas penyakit-penyakit sosial yang telah mendorong perwira-perwira muda untuk melancarkan kudeta, dan untuk membangun suatu orde baru sebagai gantinya, akan tetapi dengan cara-cara revolusioner, tanpa banyak kompromi. Dari lain pihak adanya kecaman opini dunia dan campur tangan PBB akan ikut mencegah terjadinya eksese-eksese seperti penembakan mati tahanan-tahanan tanpa proses pengadilan yang wajar.

Dalam rangka itu pembaharuan-pembaharuan yang telah dijanjikan akan dilakukan secara konsekwen. Pemerintahan otoriter pada waktunya akan diganti dengan suatu pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi hak-hak azasi, dan susunan feodal masyarakat diganti dengan suatu susunan baru yang mencerminkan persamaan hakiki semua warganegara dan keadilan sosial. Penjabat-penjabat yang korup, melalaikan tugas dan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi akan diadili dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Tempat mereka akan diisi dengan orang-orang yang tidak hanya kompeten tetapi juga dedicated dan bersih. Dengan suatu aparat yang terdiri atas penjabat-penjabat semacam itu, Pemerintah Ethiopia akan mampu mengerahkan tenaga dan dana yang tersedia untuk pembangunan demi perbaikan nasib rakyat. Termasuk kekayaan yang dikumpulkan Haile Selassie dan disimpannya di berbagai bank di Swis, yang kiranya akan dapat ditarik kembali dengan surat kuasanya. Menurut Newsweek kekayaan itu adalah sebesar \$250 juta dan menurut BBC bahkan \$1.500 juta.

Akan tetapi semuanya itu didasarkan atas asumsi, bahkan Komite Koordinasi menepati janjinya untuk pada waktunya menyerahkan kekuasaan kepada suatu pemerintah sipil yang dipilih rakyat secara demokratis dalam suatu pemilihan yang bebas. Apabila sebaliknya Komite mengingkari janjinya itu dan dengan bermacam-macam dalih berusaha untuk tetap berkuasa, keadaan orde lama akan kembali dan pada waktunya akan terjadi suatu kudeta baru yang akan menumbangkannya. Suatu pemerintah otoriter yang menginjak-injak hak-hak azasi, khususnya kemerdekaan, dan keadilan sosial tidak akan dapat bertahan selamanya. Hak-hak azasi dan keadilan sosial adalah aspirasi manusia yang paling dalam dan paling kuat dan oleh sebab itu tidak dapat diperkosa untuk jangka waktu yang panjang, terutama apabila rakyat telah sadar akan hak-haknya. Maka seperti di banyak



negara Afrika lainnya akan terjadilah bahwa kudeta yang satu akan disusul kudeta yang lain tanpa membawa perbaikan nasib rakyat. Kemungkinan itu adalah riil, akan tetapi kiranya tidak akan menjadi kenyataan, tidak hanya karena para mahasiswa dan kalangan masyarakat lain-lain akan menentangnya tetapi juga karena Komite Koordinasi terdiri atas perwira-perwira muda yang dikenal sebagai kaum idealis yang dengan jujur mencita-citakan demokrasi, hak-hak azasi, persamaan kesempatan, keadilan sosial dan lain sebagainya.

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan, bahwa rejim militer sementara Ethiopia menghadapi suatu tugas yang sangat berat, terutama karena kekurangan dana dan tenaga terdidik yang diperlukan, akan tetapi mempunyai suatu peluang yang baik untuk menyelesaikan revolusinya dengan hasil yang baik.

### Kesimpulan

Pergolakan yang terjadi di Ethiopia selama ini pada dasarnya adalah suatu revolusi, suatu perubahan radikal dalam masyarakat dan hidup kenegaraan dalam waktu yang cukup singkat. Angkatan Bersenjata di bawah pimpinan Komite Koordinasi yang terdiri atas perwira-perwira muda melancarkan gerakannya itu dengan maksud untuk merombak orde lama yang berkisar pada rejim otoriter Kaisar Haile Selassie yang sewenang-wenang dan susunan feodal masyarakat dan sebagai gantinya menyusun suatu orde baru atas dasar demokrasi, hak-hak azasi termasuk kebebasan-kebebasan dan keadilan sosial.

Berlainan dengan revolusi-revolusi lainnya, revolusi di Ethiopia itu dilaksanakan secara sistematis menurut suatu pentahapan di mana setiap tahap menyiapkan tahap berikutnya. Walaupun sasaran utama ialah Kaisar Haile Selassie sendiri, Angkatan Bersenjata baru mengambil tindakan terhadapnya dan menurunkannya dari takhta setelah menyingkirkan pembantu-pembantunya, menghancurkan loyalitas rakyat terhadapnya, membuat kaum bangsawan yang mendukungnya tidak berdaya dan membubarkan lembaga-lembaga yang digunakannya untuk melaksanakan kekuasaannya. Ciri lain ialah peranan yang dimainkan perwira-perwira muda yang menjadi otak dan dalang revolusi itu. Mereka mengambil alih kekuasaan tetapi menyatakan hanya akan berkuasa untuk sementara sebagai pemerintah transisi yang bertugas untuk menyusun orde baru dan sesudah itu akan menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang sipil yang akan dipilih rakyat secara demokratis.

Setelah berhasil menumbangkan orde lama dan mengambil alih kekuasaan, Angkatan Bersenjata meletakkan dasar-dasar orde baru sambil meneruskan pembersihan sisa-sisa orde lama, termasuk peradilan, penjabat-penjabat yang ditahan atas tuduhan melalaikan tugas, menyetel dan melakukan korupsi. Rejim baru segera mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi kepincangan-kepincangan sosial yang telah mendorong Angkatan Bersenjata untuk melancarkan geraknya seperti inflasi, pengangguran, korupsi, sistim pemilikan tanah feodal yang mengandung suatu pemerasan terhadap petani-petani penggarap tanah. Pada waktu yang sama pemerintah mulai melaksanakan pembaharuan-pembaharuan dan perbaikan-perbaikan dalam bidang administrasi, pendidikan, kesehatan, perburuhan, perpajakan, dan lain sebagainya. Tahanan-tahanan politik dibebaskan dan kepada rakyat diberikan kebebasan-kebebasan. Sebagai dasar dan kerangka hukum semuanya itu disiapkan suatu konstitusi baru yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi, hak-hak azasi dan keadilan sosial. Pada waktunya akan diadakan pemilihan umum di mana rakyat akan dapat memilih suatu parlemen yang pada gilirannya akan memilih suatu pemerintah baru.

Usaha-usaha untuk menyusun orde baru itu terbentur pada kekurangan prasarana, dana dan tenaga terdidik pada segala tingkat. Dengan demikian tugas Angkatan Bersenjata untuk menyelesaikan revolusi yang telah dimulainya itu menjadi sangat berat dan sulit. Namun rejim militer mempunyai peluang yang cukup baik. Pertama-tama, pimpinan revolusi adalah di tangan perwira-perwira muda, yang tidak hanya idealis dan mencita-citakan demokrasi, kesempatan yang sama bagi semua, pemberantasan feodalisme dan korupsi, modernisasi dan keadilan sosial, tetapi juga memiliki keberanian dan kebijaksanaan. Selain itu mereka berhasil menciptakan suatu kekompakan dalam tubuh angkatan bersenjata dan mendapatkan dukungan luas di kalangan rakyat. Dengan demikian kedudukan mereka menjadi lebih kuat, sehingga mampu menjamin kestabilan dan melaksanakan program mereka. Kebutuhan akan dana-dana untuk sebagian kiranya akan dapat ditutup dengan bantuan luar negeri yang diperkirakan akan mengalir setelah menjadi jelas bahwa mereka benar-benar memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial. Secara demikian mereka juga akan dapat menggalakkan penanaman modal asing untuk mengolah kekayaan alam yang selama ini belum dimanfaatkan sepenuhnya.



Namun tetap terbuka kemungkinan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi itu tidak membawa perbaikan-perbaikan yang diharapkan rakyat. Salah satu syarat utama agar revolusi itu dapat diselesaikan dengan baik ialah adanya suatu pemerintah yang benar-benar demokratis dan terdiri atas orang-orang yang tidak hanya kompeten tetapi juga dedicated dan bersih. Apabila perwira-perwira muda tersebut memegang janjinya untuk pada waktunya menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang semacam itu dan membatasi diri untuk menjamin keamanan, kestabilan dan percaturan politik yang wajar, maka sukses revolusi di Ethiopia itu akan lebih terjamin.



